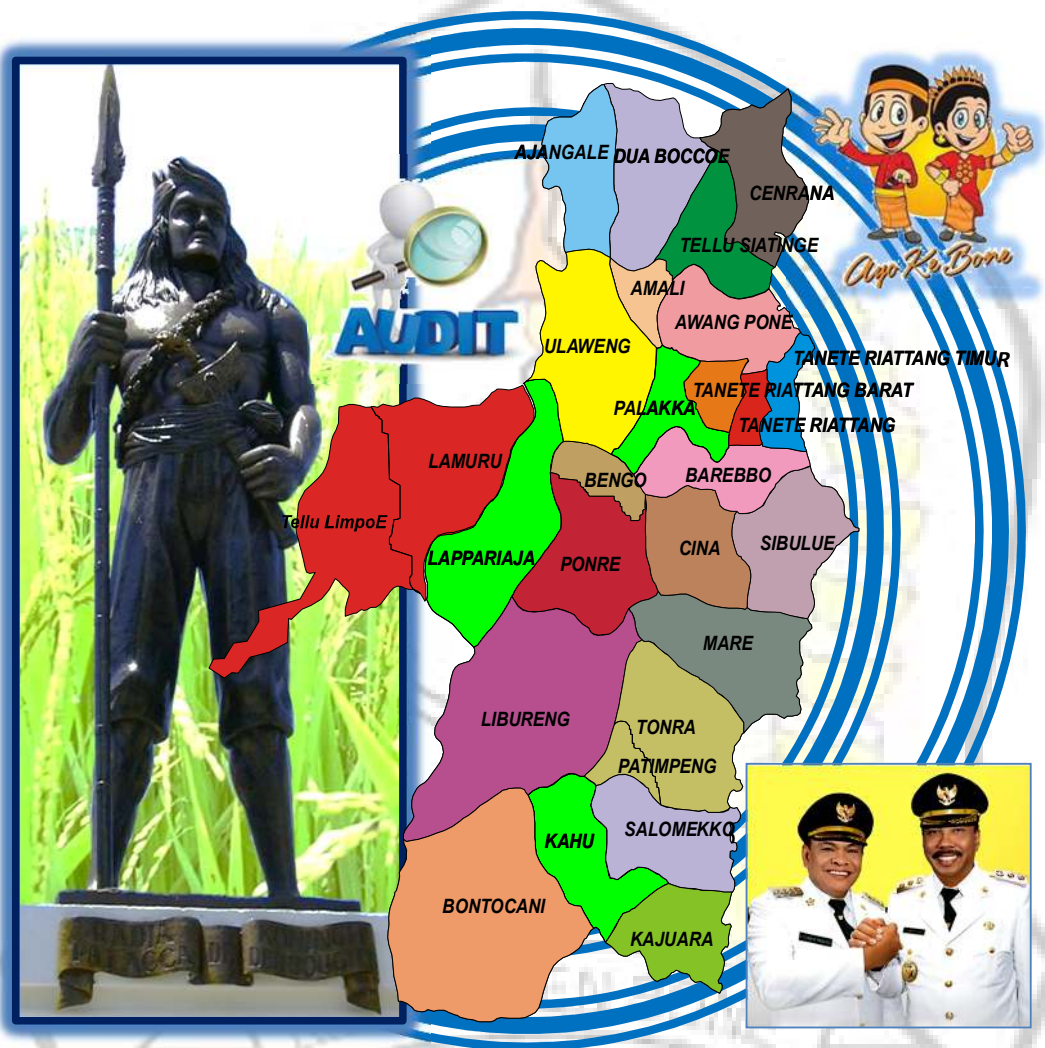




PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020



NOMOR : 01/LKj/ITDA-BONE/2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

LKj sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*) serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

LKj disusun berdasarkan pada *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah* dan *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* serta berpedoman pada *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.



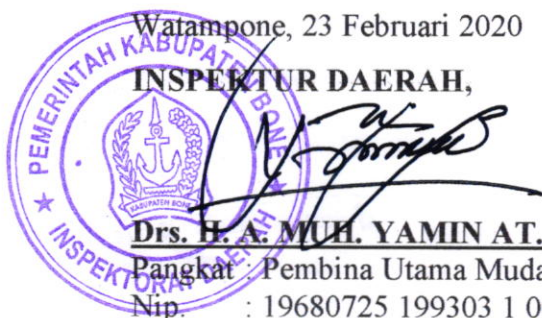
LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Inspektorat Daerah Kab. Bone Adapun Aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara umum, di tengah kondisi pandemi Covid-19 selama tahun 2020, kinerja penyelenggaraan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kab. Bone tetap menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Selain itu, disadari bahwa masih terdapat indikator kinerja sasaran yang belum optimal pencapaiannya. Hasil analisa dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020, secara komprehensif akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada masa mendatang. Selain itu, diharapkan dokumen LKj ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien pada seluruh aspek manajemen kinerja Inspektorat Daerah, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan/kebijakan organisasi dan mampu mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*clean government & good governance*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 23 Februari 2020

INSPEKTUR DAERAH,


Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19680725 199303 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu-Isu Strategis Organisasi	5
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis	9
Tujuan dan Indikator Kinerja	10
Sasaran dan Indikator Kinerja	11
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran	13
Indikator Kinerja Utama	14
Perjanjian Kinerja	16
Rencana Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja Organisasi	24
Capaian Indikator Kinerja	24
Analisis Pencapaian Kinerja	28
Realisasi Anggaran	75
Gambaran Umum Anggaran Organisasi	75
Realisasi Keuangan	76
Pemanfaatan Anggaran	76
Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan	81
BAB IV PENUTUP	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88



DAFTAR GAMBAR & TABEL

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone	4
Tabel 1 SDM Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	4
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone	10
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone.....	12
Tabel 2.3 Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone	13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone	14
Tabel 2.5 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	17
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	18
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	18
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020..	25
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	27
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Indikator Kinerja Dari Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2018-2023	28
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 8 Inspektorat Daerah Tahun 2020	29, 36, 44, 48, 56, 61, 64, 70
Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 9 Tahun 2018-2020	29, 36, 44, 48, 56, 61, 64, 70
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 8 Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2018-2023	29, 36, 44, 48, 56, 61, 64, 70
Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 8.....	32, 39, 46, 53, 59, 63, 68, 73
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1 s.d. Sasaran 8	35, 43, 47, 55, 60, 63, 69, 74
Tabel 3.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) OPD Lingkup Pemerintah Kab. Bone berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Tahun 2020	33
Tabel 3.11 Perbandingan Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK-RI atas Pemeriksaan/Audit terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2020, 2019, dan Tahun 2018	38



Tabel 3.12	Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2006 s/d 2020	41
Tabel 3.13	Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2006 s/d 2020 (Dalam rupiah)	41
Tabel 3.14	Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2009 s/d 2020	42
Tabel 3.15	Jumlah LHP berdasarkan Jenis Kegiatan Pengawasan Internal Tahun 2020	54
Tabel 3.16	Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	66
Tabel 3.17	Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone	67
Tabel 3.18	Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 & 2020 ...	75
Tabel 3.19	Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab. Bone Tahun Anggaran 2018-2020	75
Tabel 3.20	Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020	76
Tabel 3.21	Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan setelah tahun anggaran berakhir oleh setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah sebagai salah satu OPD Kab. Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi pemerintahan daerah.

LKj Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja setiap tahunnya guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, penyusunan LKj menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses implementasi SAKIP yang berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan *PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara *urusan penunjang* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk berdasarkan :

- *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah* sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019*;
- *Permendagri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone pada awalnya diatur lebih lanjut dalam *Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* dan *Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone*. Namun, dalam perkembangannya, guna penguatan Inspektorat Daerah selaku APIP, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dikaitkan dengan perubahan struktur organisasi dan penambahan fungsi. *Perubahan Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2016* telah diatur dengan *Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 6 Tahun 2020*, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 telah diganti dengan *Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020*. Dengan demikian, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone sesuai dengan perubahan aturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Inspektorat Daerah

Membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Fungsi Inspektorat Daerah

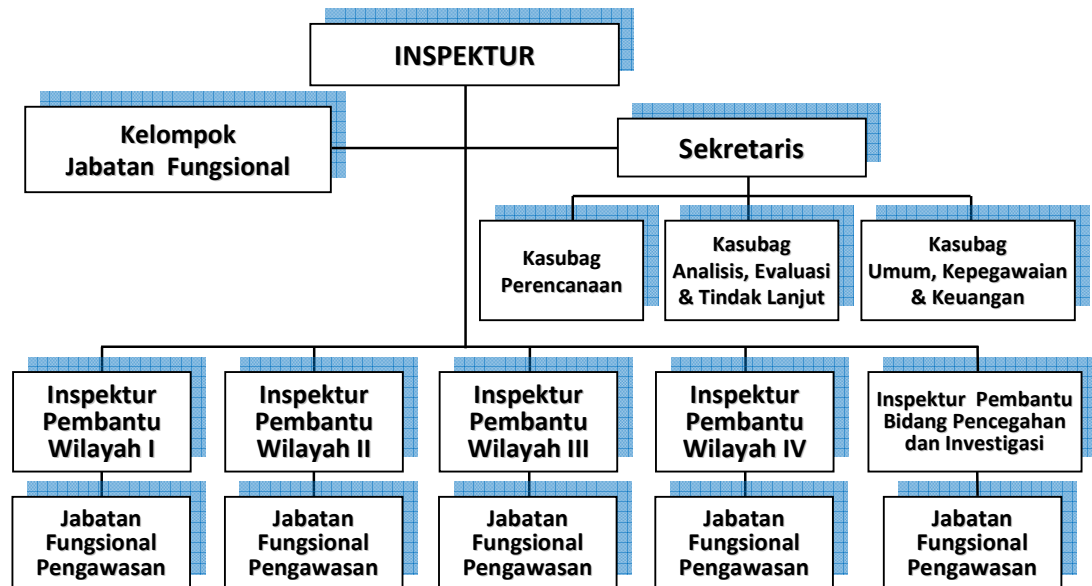
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. *Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;*
6. *Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;*
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kab. Bone memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone



Kelompok jabatan fungsional pengawasan yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone, terdiri dari :

- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF-P2UPD)
- Jabatan Fungsional Auditor (JF-A)
- Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JF-AK)

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagai berikut :

Tabel 1
SDM Inspektorat Daerah Kab. Bone

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	-	1.	Struktural	9
2.	SMP	-	2.	II	1		- Eselon II = 1 orang / 1 Jab.	
3.	SMA	1	3.	III	43		- Eselon III = 5 orang / 6 Jab.	
4.	Diploma 1	-	4.	IV	29		- Eselon IV = 3 orang / 3 Jab.	
5.	Diploma 2	-				2.	Fungsional	53
6.	Diploma 3	-					- Auditor = 30 orang	
7.	Strata 1	34					- P2UPD = 15 orang	
8.	Strata 2	38					- Audiwan = 3 orang	
9.	Strata 3	-					- Analisis Kebijakan Pertama = 1 orang	
						3.	- Calon Auditor = 4 orang	
							Staf	11
Jumlah		73	Jumlah		73	Jumlah		73



1.4 ISU-ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) ORGANISASI

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- b. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang merupakan salah satu program prioritas nasional;
- c. Tuntutan profesionalisme akan kompetensi dan etika aparat pengawasan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai Perangkat Daerah yang menjadi panutan bagi OPD lainnya;
- d. Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 3 – *Integrated* dengan catatan perbaikan) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated* secara penuh) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan;
- e. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang masih perlu didorong seoptimal mungkin untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone dapat mencapai hasil optimal yang membanggakan;



- f. Kompleksitas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang terus berkembang, khususnya ditengah-tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, dengan beban kerja yang terbilang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan keterbatasan kuantitas & kualitas aparat pengawasan, beserta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sebagai informasi terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah Kab. Bone melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada seluruh OPD dan Unit Kerja di Lingkup Pemerintahan Kab. Bone, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satpol PP, 7 Badan, 27 Dinas beserta UPTD Kecamatan, 2 BLUD-RSUD, 1 BUMD, 27 Kecamatan & 44 Kelurahan, serta ratusan Sekolah (SLTP & SD), termasuk 328 Pemerintahan Desa dengan nilai total anggaran belanja APBD sekitar 2 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir (Rp. 2.353.404.828.655,- untuk Tahun 2018, Rp. 2.526.979.745.701,- untuk Tahun 2019, dan Rp. 2.467.660.992.438,-).

Dengan melihat tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan juga hasil analisis pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diketahui isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didorong tingkat pencapaiannya secara terus menerus dan berkelanjutan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
 - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
 - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
 - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
 - Penguatan Kapabilitas APIP.
2. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI dan APIP yang masih belum optimal, perlu terus ditingkatkan secara intensif guna mendorong



- terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
3. Penanganan terhadap laporan pengaduan masyarakat termasuk didalamnya laporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan serta kasus-kasus kepegawaian sebagai salah satu bentuk pelayanan publik harus terus ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang banyak terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
 4. Belum optimalnya peningkatan Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, dan integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone, masih menjadi kondisi yang harus diprioritaskan peningkatan dan pengembangannya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Hal ini penting untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
 5. Peran Inspektorat Daerah selaku APIP sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Peran Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*), masih belum optimal peningkatan kapabilitasnya menuju *Level 3 (Integrated) secara penuh* dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Begitu pula yang terkait Manajemen Sistem Pengawasan Internal dalam pengembangan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan inventarisasi data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya, harus ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan Standar dan Prosedur yang memadai, untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone.
 6. Peningkatan efektifitas & efisiensi anggaran program dan kegiatan serta ketersediaan sarana prasarana aparatur pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kab. Bone, bila dibandingkan dengan perkembangan kompleksitas beban kerja dan wilayah pengawasan, khususnya ditengah-tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini dilakukan melalui perencanaan pengawasan berbasis resiko dan penganggaran dengan prinsip *money follow program* dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.



1.5 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP

Inovasi menjadi kunci dalam implementasi reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, dan Inspektorat Daerah Kab. Bone terus berupaya untuk mengembangkan inovasi terkait dengan pengelolaan kinerja pengawasan. Salah satu upaya pengembangan yang telah dilakukan namun masih perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan teknologi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) Pemda yang diciptakan oleh BPKP-RI selaku mitra kerja pengawasan internal dalam pengelolaan data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

Namun kedepannya, inovasi dalam bentuk adaptasi dan modifikasi terkait aplikasi ini masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan sesuai dinamika pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, termasuk inovasi dalam pemberian jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan pemerintah desa, guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



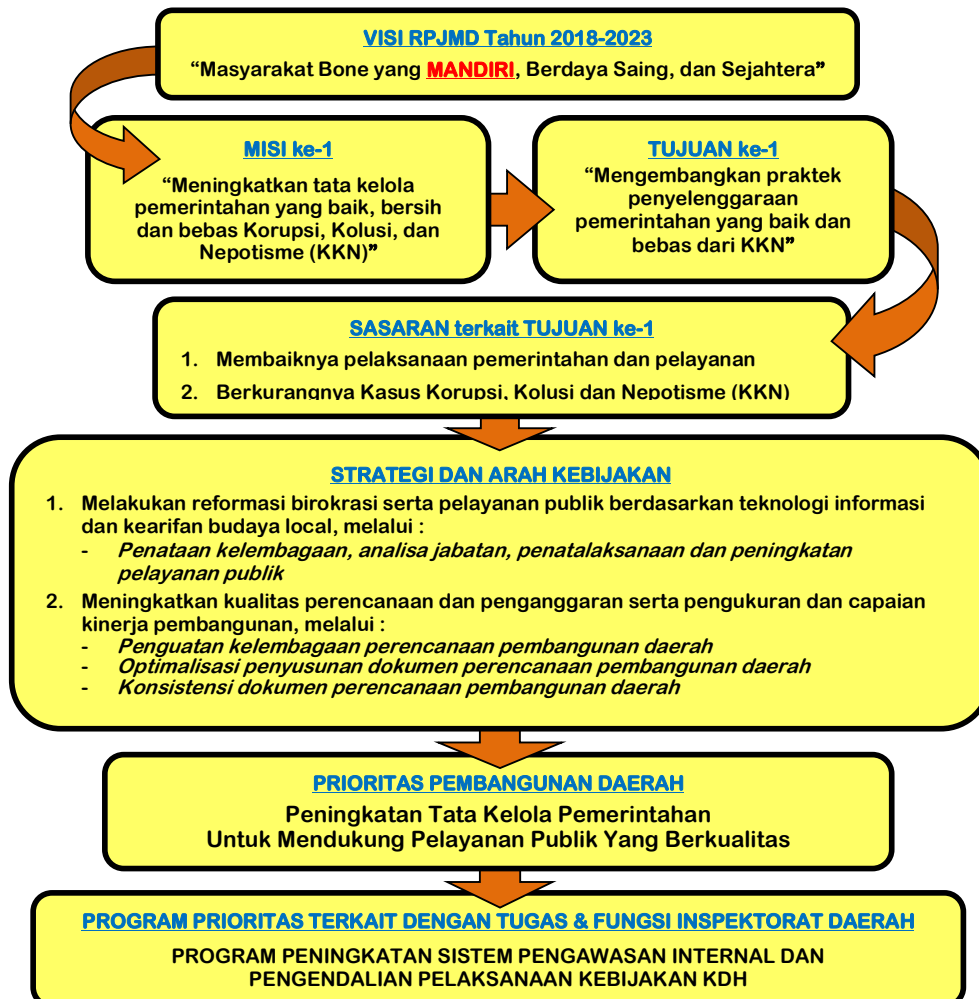
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program perangkat daerah selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Alur keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :





Tujuan Dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana yang telah digambarkan pada alur keterkaitan di atas, maka tujuan strategis yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam periode tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

- Tujuan 1 : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*
- Tujuan 2 : *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*
- Tujuan 3 : *Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.*
- Tujuan 4 : *Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Tujuan 5 : *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	CC (50,50)	A (>80 – 90)
	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(masih ada temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</i>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(Pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)</i>
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks	C (>30 – 50)	BB (>70 – 80)
	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 1 (Rintisan)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen	80%	99%



TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85%	100%
Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85%	100%
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen	45%	90%
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated)

Sasaran Dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.

Sasaran : 1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
 2. *Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

- Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sasaran : 1. *Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.*
 2. *Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN.*



- Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Sasaran : 1. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Tujuan 4 : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda.

- Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	CC (50,50)	A (>80 – 90)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (masih ada temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (Pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks	C (>30 – 50)	BB (>70 – 80)
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 1 (Rintisan)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen	80%	99%



SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85%	100%
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kependagangian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kependagangian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85%	100%
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen	45%	90%
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated)

Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Adapun program-program strategis untuk mendukung masing-masing pencapaian target sasaran kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

*Tabel 2.3
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone*

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	



SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Inspektorat Daerah Kab. Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	<p><u>Penjelasan Target</u> :</p> <p>Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB</p> <p><u>Sumber Data</u> :</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023</p>



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	<p><u>Penjelasan Target :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p> <p><u>Sumber Data :</u> Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2018-2023</p>
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks (dengan Nilai)	<p><u>Penjelasan Target :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan oleh Inspektorat Daerah secara online melalui Aplikasi Kementerian PAN-RB</p> <p><u>Sumber Data :</u> Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023</p>
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Level)	<p><u>Penjelasan Target :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP</p> <p><u>Sumber Data :</u> Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemkab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023</p>
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target :</u> (Perbandingan antara <i>Jumlah OPD + PemDes yang Bersih dari Temuan KKN</i> dengan <i>Jumlah Total OPD + PemDes</i>) dikali 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap OPD dan PemDes Lingkup Kab. Bone, baik oleh APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-2023</p>



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target :</u> (Perbandingan antara <i>Jumlah Laporan Hasil Penanganan/ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat</i> dengan <i>Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat</i>) dikali 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Data Laporan Realisasi Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone atas penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023</p>

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi.. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Bone.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Bone dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020, dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sebagai wujud komitmen Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam dokumen Renja/RKT beserta perubahannya pada Tahun 2020, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Bone (tersaji pada **Lampiran 1**). Meskipun telah ada perubahan Renja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja terkait sasaran kinerja tidak mengalami perubahan target kinerja atas indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan di awal tahun 2020.

Ringkasan atau Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020, tersaji dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.5
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	B (>60 – 70)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks	CC (>50 – 60)
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen	90%
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	95%
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	95%
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen	60%
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan



2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada T.A. 2020, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.668.991.531,-. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah pada APBD Kab. Bone T.A. 2020 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

BELANJA	PAGU ANGGARAN SEBELUM & SETELAH PERUBAHAN	
	DPA No. 287 Tahun 2019 Tgl. 16 Desember 2019	DPPA No. 509 Tahun 2020 Tgl. 22 September 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 8.228.065.251,-	Rp. 8.512.795.609,-
BELANJA LANGSUNG	Rp. 6.772.025.250,-	Rp. 5.057.329.450,-
- Belanja Pegawai	Rp. 67.500.000,-	Rp. 16.300.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.440.025.250,-	Rp. 4.818.529.450,-
- Belanja Modal	Rp. 264.500.000,-	Rp. 222.500.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.000.090.501,-	Rp. 13.570.125.059,-

Anggaran belanja langsung senilai Rp. 5.057.329.450,- (setelah perubahan) untuk membiayai pelaksanaan 7 program dan 27 kegiatan pada tahun 2020, yang awalnya terdiri dari 8 Program dan 30 Kegiatan (sebelum perubahan anggaran) sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Namun, karena adanya kebijakan realokasi dan refocusing anggaran belanja untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020, dilakukan perubahan Renja Tahun 2020 dalam hal penyesuaian anggaran dan target kinerja program dan kegiatan, dengan perubahan alokasi anggaran terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (>60 – 70)	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 2.581.358.500,- • Rp. 2.479.208.500,-	51 %



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.600.000,- Rp. 61.050.000,- Rp. 37.500.000,- 	
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)			
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)			
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	90%			
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95%	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 	Rp. 251.725.000,- • Rp. 251.725.000,-	5,0 %
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95%	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya 	Rp. 131.250.000,- • Rp. 131.250.000,-	2,6 %



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	60%	2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. • Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan • Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp. 335.020.000,- • Rp. 310.000.000,- • Rp. 25.020.000,-	6,6 %
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. • Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Rp. 30.900.000,- • Rp. 30.900.000,-	0,6 %
			4. Program Penunjang Pemerintahan Umum. • Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah • Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah • Promosi dan Pameran Pembangunan	Rp. 32.712.500,- • Rp. 16.712.500,- • Rp. 16.000.000,-	0,7 %
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. • Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 3.661.500,- • Rp. 1.361.000,- • Rp. 2.300.500,-	0,1 %
			6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. • Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 746.498.000,- • Rp. 38.000.000,-	14,8 %



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor • Kegiatan Pengadaan Mebeleur • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 154.500.000,- • Rp. 30.000.000,- • Rp. 356.448.000,- • Rp. 146.350.000,- • Rp. 7.800.000,- • Rp. 11.000.000,- • Rp. 2.400.000,- 	
			7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik • Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan • Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah • Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 	Rp. 944.203.950,- <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 33.810.000,- • Rp. 79.920.000,- • Rp. 1.046.000,- • Rp. 15.840.000,- • Rp. 609.350.000,- • Rp. 204.237.950,- 	18,7 %
TOTAL ANGGARAN				Rp. 5.057.329.450,-	100 %

Tabel tersebut diatas menjelaskan program dan kegiatan beserta anggarannya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Renja/RKT Tahun 2020 beserta perubahannya dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.



Dari tabel tersebut, jumlah anggaran untuk seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 5.057.329.450,-. Dari total 7 Program, 3 diantaranya adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja Kelima Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone, dan 4 Program lainnya merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian seluruh sasaran yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Persentase terbesar anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis (sasaran ke-1 s.d. ke-6) dengan besaran 58,6% dari total anggaran belanja langsung. Pencapaian target indikator kinerja dari keenam sasaran ini dilaksanakan dengan satu Program Utama yaitu *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*.

Namun demikian, secara keseluruhan, ketujuh program beserta kegiatan sebagaimana tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung satu sama lainnya. Keberhasilan pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020, ditentukan dari hasil pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut di atas.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian target indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sehingga dapat diperoleh gambaran umum prestasi kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan tingkat capaian kinerja per indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Skala pengukuran ordinal yang digunakan dengan pendekatan nilai persentase capaian kinerja yang disepakati terbagi atas 5 (lima) tingkatan kriteria, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
1	Nilai >100 %	Sangat Baik
2	75 % < Nilai ≤ 100%	Baik
3	65 % < Nilai ≤ 75 %	Cukup
4	51 % < Nilai ≤ 65 %	Kurang
5	Nilai ≤ 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dapat dinilai kriteria realisasi capaian kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Tahun Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2020. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2020 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2018-2023;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2020, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dari 9 Indikator Kinerja atas 8 Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020, terdapat 3 Indikator Kinerja yang telah memenuhi/melebihi target kinerja ($\% \text{ capaian kinerja} \geq 100\%$), 2 Indikator Kinerja yang belum mencapai target ($\% \text{ capaian kinerja} < 100\%$), sedangkan 4 Indikator Kinerja lainnya tidak dapat diukur capaian kinerjanya disebabkan oleh data realisasi kinerja yang bersumber dari hasil evaluasi/penilaian (assessment) oleh instansi terkait belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini.

Realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dibandingkan dengan target kinerja dari setiap indikator sasaran beserta persentase capaian kinerjanya, dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2023	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	A (>80 – 90)	B (>60 – 70)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya	-
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100%	Baik
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	BB (>70 – 80)	CC (>50 – 60)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya	-
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya	-
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	99%	90%	99,77%	111%	Sangat Baik
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100%	95%	100%	105%	Sangat Baik
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100%	95%	91,67%	96,5%	Baik
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	90%	60%	58%	96,7%	Baik
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya	-



Dari tabel 3.2 diatas, terdapat beberapa indikator kinerja yang satuan target capaiannya beserta realisasinya yang dikategorikan dengan indeks, predikat atau status yang sifatnya kualitatif dan tidak dapat diukur secara numerik, sehingga pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerjanya diperoleh dengan pendekatan tersendiri melalui pembobotan nilai atau skoring capaian atas setiap tingkatan realisasi kinerja yang berlaku. Indikator kinerja yang dimaksud beserta pendekatan nilai untuk pengukuran tingkat capaian kinerjanya (dari yang tertinggi ke yang terendah) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi

KATEGORI		SKOR CAPAIAN
AA (Sangat Memuaskan/Istimewa)	dengan Nilai >90 - 100	95
A (Memuaskan)	dengan Nilai >80 - 90	85
BB (Sangat Baik)	dengan Nilai >70 - 80	75
B (Baik)	dengan Nilai >60 - 70	65
CC (Cukup Memadai)	dengan Nilai >50 - 60	55
C (Kurang)	dengan Nilai >30 - 50	40
D (Sangat Kurang)	dengan Nilai 0 - 30	15

Catatan : Skor Capaian ditetapkan dari nilai tengah Range Nilai Predikat Evaluasi SAKIP

2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

KATEGORI		SKOR CAPAIAN
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)		4
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)		3
TW (Tidak Wajar)		2
TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)		1

3. Tingkat Maturitas SPIP

KATEGORI		SKOR CAPAIAN
Level 5 (Optimum)	dengan nilai ($4,5 \leq \text{Nilai} < 5$)	4,75
Level 4 (Terkelola & Terukur)	dengan nilai ($4 \leq \text{Nilai} < 4,5$)	4,25
Level 3 (Terdefinisi)	dengan nilai ($3 \leq \text{Nilai} < 4$)	3,5
Level 2 (Berkembang)	dengan nilai ($2 \leq \text{Nilai} < 3$)	2,5
Level 1 (Rintisan)	dengan nilai ($1 \leq \text{Nilai} < 2$)	1,5
Level 0 (Belum Ada)	dengan nilai ($\text{Nilai} < 1$)	0,5

Catatan : Skor Capaian ditetapkan dari nilai tengah Range Nilai Level Maturitas SPIP

4. Tingkat Kapabilitas APIP

KATEGORI		SKOR CAPAIAN
Level 5 (Optimizing)		5
Level 4 (Managed)		4
Level 3 (Integrated)		3
Level 3 (Integrated)	Dengan Catatan Perbaikan	2,5
Level 2 (Infrastructure)		2
Level 2 (Infrastructure)	Dengan Catatan Perbaikan	1,5
Level 1 (Initial)		1

Berdasarkan skoring tersebut diatas, dilakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, dimana skor atas realisasi kinerja diperbandingkan dengan skor target kinerja lalu dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 di atas.



Dari data realisasi capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran tersebut di atas, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dan indikator kinerja penting yang mendukung tercapainya indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur.

Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone di Tahun 2020 terhadap target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2020	REALISASI KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (>60 – 70)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPANRB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100% (Baik)
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPANRB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
5.	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	90%	99,77%	111% (Sangat Baik)
6.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95%	100%	105% (Sangat Baik)

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone di Tahun 2020 terhadap target kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Indikator Kinerja dari
Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2018-2023

SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2023)	TARGET KINERJA RPJMD (2020)	REALISASI KINERJA (2020)	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RPJMD (2020)
Tujuan 1 : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (>70 – 80)	CC (>50 – 60)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
Sasaran 1.1. : Membaiknya Pelaksanaan Pemerintahan dan Pelayanan	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (LKPD T.A. 2022)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (LKPD T.A. 2019)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (LKPD T.A. 2019)	100 % (Baik)
	Nilai SAKIP	A (>80 - 90)	B (>60 – 70)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPANR B untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
Sasaran 1.2. : Berkurangnya Kasus KKN	Proporsi OPD yang bersih dari KKN	99 %	90 %	98,48 %	109 % (Sangat Baik)

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2020.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENJA dan PERJANJIAN KINERJA Tahun 2020, RENSTRA dan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berikut ini:



1. **SASARAN PERTAMA :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 1

Tabel 3.5.1
Capaian Kinerja Sasaran 1 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (>60 – 70)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1

Tabel 3.6.1
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 1 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB untuk Tahun 2020	B (60,03)	CC (50,50)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 1

Tabel 3.7.1
Capaian Kinerja Sasaran 1-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	A (> 80 - 90)	B (60,03)	76 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 1

Meskipun capaian kinerja terkait dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini belum diperoleh untuk tahun 2020, namun berdasarkan capaian kinerja terakhir hingga tahun sebelumnya, sudah sejalan dengan target Pemerintah Pusat yang menargetkan peningkatan kualitas LKJ-IP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan standar nasional yang minimal harus memperoleh Predikat B (>60-70) berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan dari Sasaran 1

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu, Nilai Capaian Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang divalidasi dan dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kab. Bone yang dilakukan oleh KemenPANRB atau Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Dari tabel 3.5.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran pertama ini tidak dapat disajikan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kab. Bone oleh KemenPANRB yang dilakukan pada tahun 2020, belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerja pada tahun 2020.

Namun, bila melihat Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kab. Bone hingga tahun sebelumnya sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.6.1, menunjukkan bahwa Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bone berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2019 adalah B (Baik) dengan Nilai 60,03, yang terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Nilai capaian tersebut di atas bersumber dari Surat KemenPAN-RB Nomor B/263/AA.05/2019 tertanggal 30 Desember 2019. Adapun rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kab. Bone pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI 2018/2019
A	Perencanaan Kinerja	30 %	20,99
B	Pengukuran Kinerja	25 %	14,36
C	Pelaporan Kinerja	15 %	9,84
D	Evaluasi Internal	10 %	5,66
E	Pencapaian Kinerja	20 %	9,18
	Jumlah	100 %	60,03

Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini selama tahun 2018-2020, belum memenuhi pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, yaitu kategori A (Memuaskan) dengan target nilai >80-90 seperti tersaji pada tabel 3.7.1.



Target capaian tersebut merupakan capaian tertinggi yang diharapkan bisa segera tercapai dalam rentang periode Tahun 2018-2023, terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone.

Kondisi pencapaian kinerja yang diperoleh sejauh ini tidak terlepas dari :

1. Komitmen dan kerja sama dari seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing perangkat daerah sebagai pengampu atas seluruh capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023.
2. Pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan oleh Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kab. Bone kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, terkait dengan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bone dan juga Laporan Kinerja Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang masih perlu diperbaiki khususnya yang terkait dengan proses pengukuran data kinerja dan evaluasi capaian kinerja, yang belum bisa terlaksana secara berkala dan tepat waktu, sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian dan kualitas pelaporan kinerja.

Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena masih cukup lemahnya pengendalian internal dalam proses manajemen kinerja (implementasi SAKIP) disetiap jenjang manajemen pemerintahan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporannya, disamping kualitas dokumen perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan sebagai komponen dasar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kompetensi ASN pemangku jabatan struktural/administrasi yang belum sepenuhnya memahami implementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan berbasis resiko yang lebih intensif dan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh OPD dalam Lingkup Pemerintahan Kab. Bone Hal ini dilakukan dalam bentuk penjaminan mutu (audit internal) dan jasa konsultatif (pendampingan/asistensi), dengan tujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam penerapan SAKIP, khususnya terhadap hal-hal yang mempengaruhi kualitas penyajian LKj-IP Kab. Bone.



6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.8.1
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.543.858.500,-	Rp. 2.203.804.200,-	87 %
		1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 2.479.208.500,-	Rp. 2.154.354.200,-	87 %
		2. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
		3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Rp. 61.050.000,-	Rp. 45.850.000,-	75 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan, dan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif*.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan internal dalam bentuk penjaminan kualitas/quality assurance (audit/reviu/evaluasi/pemantauan) dan jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan), dengan berpedoman pada dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Dalam prosesnya, aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone melakukan penjaminan kualitas dalam bentuk Evaluasi Implementasi SAKIP pada 66 OPD (Badan, Dinas dan Kecamatan) yang disertai dengan pemberian jasa konsultasi kepada aparat perencana OPD yang berperan penting dalam proses Implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020, menunjukkan bahwa persentase OPD dengan nilai akuntabilitas kinerja minimal B berada pada angka 53,03% dari target 65%, dengan rincian data sebagai berikut :



Tabel 3.10

Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Tahun 2020 - OPD Lingkup Pemerintah Kab. Bone berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	
		PREDIKAT	NILAI
	OPD - BADAN, DINAS & INSTANSI TEKNIS LAINNYA		
1	Inspektorat Daerah	BB	73,46
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BB	71,18
3	Badan Pendapatan Daerah	BB	70,60
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	69,82
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	69,82
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	69,72
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	69,61
8	Dinas Ketenagakerjaan	B	69,60
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	B	69,50
10	Dinas Lingkungan Hidup	B	68,72
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	68,55
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B	68,39
13	BLUD Rumah Sakit Tenriawaru	B	67,77
14	Dinas Kebudayaan	B	67,36
15	Dinas Kesehatan	B	67,37
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	67,06
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	B	66,10
18	Dinas Pariwisata	B	65,99
19	Dinas Sosial	B	65,61
20	Dinas Ketahanan Pangan	B	65,48
21	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	B	65,35
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	65,15
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	B	64,81
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	B	64,28
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	63,84
26	Dinas Perdagangan	B	63,62
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	63,62
28	Dinas Perindustrian	B	63,47
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B	63,31
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	61,99
31	Satuan Polisi Pamong Praja	B	61,56
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	61,24
33	Dinas Peternakan	B	61,22
34	Dinas Perhubungan	B	60,38
35	Sekretariat DPRD	CC	57,54
36	Sekretariat Daerah	CC	55,58
37	Dinas Pemadam Kebakaran	CC	54,45
38	Dinas Pendidikan	CC	50,77
39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	C	45,80



NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	
		PREDIKAT	NILAI
	OPD - KECAMATAN		
1	Kec. Tanete Riattang	B	60,54
2	Kec. Dua Boccoe	CC	59,94
3	Kec. Palakka	CC	59,24
4	Kec. Salomekko	CC	59,04
5	Kec. Tellu Siattingnge	CC	58,55
6	Kec. Ajangale	CC	57,69
7	Kec. Kajuara	CC	57,16
8	Kec. Tanete Riattang Timur	CC	56,20
9	Kec. Ponre	CC	56,16
10	Kec. Cenrana	CC	56,12
11	Kec. Amali	CC	55,68
12	Kec. Mare	CC	55,67
13	Kec. Lappariaja	CC	54,27
14	Kec. Barebbo	CC	52,22
15	Kec. Awangpone	CC	51,55
16	Kec. Libureng	CC	51,22
17	Kec. Cina	CC	50,26
18	Kec. Patimpeng	CC	50,11
19	Kec. Sibulue	C	48,08
20	Kec Bontocani	C	46,69
21	Kec. Tonra	C	42,17
22	Kec. Bengo	C	37,19
23	Kec. Ulaweng	C	33,89
24	Kec. Lamuru	C	32,17
25	Kec. Kahu	C	31,66
26	Kec. Tanete Riattang Barat	D	29,09
27	Kec. Tellu Limpoe	D	18,42

Sumber Data : Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2019/2020 pada OPD Lingkup Pemerintah Kab. Bone - Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kedepannya, hasil evaluasi tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat Daerah dan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk segera dilakukan upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dengan penerapan seluruh komponen penilaian SAKIP secara baik dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan internal terkait hal ini juga akan lebih dioptimalkan guna mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bone, melalui kerja sama Pemerintah Kab. Bone dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan beserta KemenPANRB.



Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja, masih diperlukan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam proses penjaminan mutu dan pemberian jasa konsultasi, untuk lebih mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP khususnya yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini akan dilakukan melalui pemberian pelatihan dalam bentuk Diklat/Bimtek/Pelatihan Kantor Sendiri secara berkelanjutan bagi aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

Tabel 3.9.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2020	87 %	-

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini tidak dapat diperoleh pengukurannya. Hal ini dikarenakan data realisasi kinerja berupa *Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kab. Bone oleh KemenPANRB* yang dilakukan pada tahun 2020, belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerjanya untuk dapat diperbandingkan dengan persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja sasaran ini.



2. SASARAN KE-DUA :

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 2

Tabel 3.5.2
Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2019)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	100 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 2

Tabel 3.6.2
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2019)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 2

Tabel 3.7.2
Capaian Kinerja Sasaran 2-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
2.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2019)	100 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 2

Capaian kinerja hingga tahun 2020 terkait dengan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini sudah sejalan dengan target Pemerintah Pusat yang menargetkan peningkatan kualitas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan standar nasional harus memperoleh Opini WTP berdasarkan hasil audit BPK-RI.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan dari Sasaran 2

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh, harus disertai dengan pengurangan nilai temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI dibandingkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.5.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran kedua ini telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana Opini BPK-RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone T.A. 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau ***tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dengan kategori Baik (76 ~ 100 %).***

Bila dibandingkan dengan hasil audit BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Kab. Bone pada tahun sebelumnya sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.6.2, menunjukkan bahwa Opini WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2016, telah dapat dipertahankan hingga tahun 2020.

Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini selama tahun 2018-2020, juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, yaitu Opini WTP seperti tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.2, dimana capaian ini dapat dipertahankan secara berturut-turut sejak tahun 2016 terkait peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari :

1. Komitmen dan kerja sama dari seluruh unsur pengelola keuangan dan aset daerah dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kab. Bone khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun sebelumnya.

Terkait dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bone, terdapat penurunan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil audit BPK-RI atas LKPD T.A. 2019 terhadap LKPD T.A. 2018, dan juga tidak terdapat temuan yang bernilai rupiah, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :



Tabel 3.11
Perbandingan Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK-RI atas
Pemeriksaan/Audit terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2020, 2019 dan 2018

TAHUN DAN OBJEK PEMERIKSAAN BPK-RI	JUMLAH TEMUAN	REKOMENDASI	
		JUMLAH	NILAI (RP)
Tahun Pemeriksaan 2020 LKPD T. A. 2019	9	23	0,0
Tahun Pemeriksaan 2019 LKPD T. A. 2018	12	42	0,0
Tahun Pemeriksaan 2018 LKPD T. A. 2017	11	36	207.787.334,30

Sumber Data : Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP-BPK Per Desember 2020

Namun demikian, beberapa catatan pokok-pokok hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD T.A. 2019 yang perlu diperhatikan kedepannya agar tidak berulang sebagai temuan, secara garis besar meliputi dua aspek pemeriksaan, yaitu :

a. *Sistem Pengendalian Internal* :

1. Kesalahan penganggaran belanja pada APBD T.A. 2019;
2. Penyisihan Piutang Tidak Optimal dan Penghapusan terhadap Piutang Yang Hak Tagihnya kadaluwarsa dan berlarut-larut sebesar Rp. 4.861.818.798,20;
3. Penatausahaan Persediaan Obat dan Barang Medis Habis Pakai pada Dinas Kesehatan belum sesuai ketentuan; dan
4. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap belummemadai;

a. *Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan* :

1. Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang tidak dilengkapi dengan analisis investasi ;
2. Penetapan Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan belum optimal;
3. Pengelolaan Penerimaan PAD di RSUD Datu Pancaitana belum memadai;
4. Pengelolaan Belanja Hibah Tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan; dan
5. Kelebihan Pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp. 139.763.173,31.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan dalam dua aspek tersebut di atas tersebar pada 31 OPD Pemerintah Kab. Bone, sehingga persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI sebesar 46,97% dari target 95% untuk tahun 2019.



Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena masih cukup lemahnya pengendalian internal dan tindak lanjut terkait hal-hal tersebut di atas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporannya.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan berbasis resiko yang lebih intensif dan koordinasi yang berkelanjutan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan seluruh OPD dalam Lingkup Pemerintahan Kab. Bone, dalam bentuk penjaminan mutu (audit/reviu/evaluasi/pemantauan) dan jasa konsultatif (pendampingan/asistensi), dengan tujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maupun dalam hal peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap hal-hal yang mempengaruhi kualitas penyajian LKPD Kab. Bone.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.8.2
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.543.858.500,-	Rp. 2.203.804.200,-	87 %
		1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 2.479.208.500,-	Rp. 2.154.354.200,-	87 %
		2. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
		3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Rp. 61.050.000,-	Rp. 45.850.000,-	75 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan..*



Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai yang disertai peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan internal dalam bentuk penjaminan kualitas/quality assurance (audit, reuiu, evaluasi, pemantauan) dan jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan), dengan berpedoman pada dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020, berupa Audit, Reuiu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, hal mendasar yang terus menerus dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone adalah mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah agar berjalan lebih efektif, efisien, dan ekonomis dengan Sistem Pengendalian Internal dan Tingkat Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang lebih memadai. Termasuk didalamnya, terus mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sejak tahun 2006 s.d. 2020, dimana hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Bone.

Berdasarkan pemutakhiran data terakhir penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI, kinerja penyelesaian TLHP ini menunjukkan tren positif, dimana terdapat peningkatan nilai persentase (rasio) penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2006 - 2019.

Hingga tahun 2020, rasio penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI (selama tahun 2006 s/d 2020) sebesar 81% atau sebanyak 648 rekomendasi yang terselesaikan dari total 800 rekomendasi temuan BPK-RI (*tersaji pada tabel 3.12*). Namun, berdasarkan nilai rekomendasi temuan dalam rupiah, telah selesai ditindaklanjuti sebesar 91,07% atau Rp. 12,33 Milyar dari Total Nilai Rekomendasi Rp. 13,53 Milyar (*tersaji pada tabel 3.13*).

Data rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2006 s.d. 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.12
Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2006 s/d 2020

TAHUN	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT			
			Telah Selesai Ditindak-Lanjuti Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan Yang Sah
2006	17	33	32	1	-	-
2007	21	44	42	0	-	2
2008	39	66	63	1	-	2
2009	17	37	35	2	-	-
2010	31	100	77	21	-	2
2011	16	33	29	4	-	-
2012	24	61	51	7	-	3
2013	34	87	55	8	-	24
2014	23	61	52	9	-	-
2015	21	52	37	15	-	-
2016	10	60	46	14	-	-
2017	20	49	43	6	-	-
2018	19	52	38	14	-	-
2019	12	42	33	9	-	-
2020	9	23	15	8	-	-
TOTAL	313	800	648	119	0	33

Sumber Data : Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DTRLHP) BPK-RI Pada Pemerintah Kab. Bone s.d. Bulan Desember Tahun 2020 (*Dokumen BPK-RI*)

Untuk nilai rekomendasi dalam rupiah beserta tindak lanjutnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Data Rekapitulasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2006 S/D 2020 (Dalam Nilai Rupiah)

TAHUN	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI (DALAM SATUAN RIBU RUPIAH)	STATUS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT (DALAM SATUAN RIBU RUPIAH)			
			Telah Selesai Ditindak-Lanjuti Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti dengan Alasan Yang Sah
2006	17	1.914.616	1.703.776	210.840	-	-
2007	21	11.093	11.093	-	-	-
2008	39	2.475.359	2.310.449	136.437	-	28.472
2009	17	553.709	553.709	-	-	-
2010	31	313.914	313.914	-	-	-
2011	16	511.421	476.987	34.434	-	-
2012	24	2.065.689	1.783.510	282.179	-	-
2013	34	530.328	530.328	-	-	-
2014	23	231.371	231.371	-	-	-
2015	21	489.670	489.670	-	-	-
2016	10	4.196.534	3.680.740	515.795	-	-
2017	20	31.175	31.175	-	-	-



2018	19	207.787	207.787	-	-	-
2019	12	-	-	-	-	-
2020	12	-	-	-	-	-
TOTAL	313	13.532.666	12.324.509	1.179.685	-	28.472

Sumber Data : Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DTRLHP) BPK-RI Pada Pemerintah Kab. Bone s.d. Bulan Desember Tahun 2020 (*Dokumen BPK-RI*)

Kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel, dan Inspektorat Daerah Kab. Bone) juga menjadi pendorong (trigger) dalam meningkatkan pencapaian target indikator Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah. Karena secara tidak langsung, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP dapat meminimalisir temuan pemeriksaan oleh BPK-RI.

Hingga bulan Desember 2020, rasio/persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel, dan Inspektorat Daerah Kab. Bone) mencapai 81,33% (*tersaji pada tabel 3.14*) atau sebanyak 5178 rekomendasi yang terselesaikan dari total 6367 rekomendasi temuan APIP. Namun, berdasarkan nilai rekomendasi temuan dalam rupiah, yang telah ditindaklanjuti hanya sebesar 29,99% atau Rp. 9,53 Milyar dari Total Nilai Rekomendasi Rp. 30,87 Milyar (*tersaji pada tabel 3.14*).

Rincian data rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2006 s.d. 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2009 s/d 2020

INSTANSI APIP Dan TAHUN PEMERIKSAAN	JUMLAH REKOMENDASI	NILAI REKOMENDASI (Dalam Satuan Ribu Rupiah)	TELAH DITINDAKLANJUTI SESUAI REKOMENDASI			
			JUMLAH	%	Rp. (Juta Rupiah)	%
BPKP	208	2.906.772	167	80,29	2.634.573	90,64
Tahun 2009-2017	194	2.901.772	156	80,41	2.629.573	90,62
Tahun 2018-2020	14	5.000	11	78,57	5.000	100
Inspektorat Prov. Sul-Sel	223	88.499	168	75,34	88.499	100
Tahun 2013-2017	179	88.499	155	86,59	88.499	100
Tahun 2018-2020	44	-	13	29,55	-	-
Inspektorat Kab. Bone	5936	27.877.590	4843	81,59	6.535.332	23,44
Tahun 2018-2020	5936	27.877.590	4843	81,59	6.535.332	23,44
Total	6367	30.872.862	5178	81,33	9.528.405	29,99

Sumber Data : Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DTRLHP) APIP Pada Pemerintah Kab. Bone s.d. Bulan Desember Tahun 2020 (*Dokumen Inspektorat Daerah Kab. Bone*)



Dari data kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sebagaimana tersaji pada tabel-tabel diatas, menunjukkan bahwa kedepannya diperlukan optimalisasi penyelesaian tindak lanjut setiap temuan hasil pemeriksaan yang sangat ditentukan oleh komitmen setiap Kepala OPD dan juga Pemerintah Desa serta koordinasi pemantauan yang lebih intensif dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Bone.

Selain itu, upaya pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone akan lebih dioptimalkan pada pencegahan untuk meminimalisir terjadinya temuan berulang berupa kesalahan-kesalahan administratif dan potensi kerugian negara/daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Upaya pencegahan ini akan dilakukan melalui perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko dengan tetap memperhatikan prioritas manajemen dalam pembangunan daerah..

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja berupa Laporan Hasil Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya masalah waktu penyelesaian dan kualitas laporan hasil pengawasan, kedepannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui penerapan kendali mutu pengawasan sesuai dengan pedoman kendali mutu yang telah ditetapkan di dalam setiap penugasan tim pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 2

Tabel 3.9.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
2.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100 %	87 %	13 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini terbilang baik dengan nilai efisiensi sebesar 13%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 87%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 100%).



3. SASARAN KE-TIGA :

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 3

Tabel 3.5.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPANRB untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 3

Tabel 3.6.3
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 3 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Belum Ada Hasil Evaluasi dari KemenPANRB untuk Tahun 2020	C (36,72)	C (>30-50)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 3

Tabel 3.7.3
Capaian Kinerja Sasaran 3-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	BB (> 70 - 80)	C (36,72)	53 % (Kurang)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 3

Realisasi kinerja sasaran ini belum diperoleh untuk tahun 2020, dan berdasarkan data realisasi kinerja terakhir pada tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2020, capaian kinerja terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah ini, masih jauh dari target Pemerintah Pusat yang menargetkan peningkatan Indeks RB Provinsi/Kabupaten/Kota dengan standar nasional yang minimal harus memperoleh Predikat B (>60-70) berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan dari Sasaran 3

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, Nilai indeks reformasi birokrasi ini diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi KemenPANRB terhadap hasil evaluasi final atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh tim assessor pemerintah daerah, termasuk Inspektorat Daerah didalamnya yang melaksanakan penilaian mandiri secara online melalui aplikasi PMPRB-KemenPANRB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kab. Bone. Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pencapaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan juga menjadi penilaian sejauh mana proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan baik dan bersih dari KKN sebagaimana tujuan Pemerintah Kab. Bone yang dinyatakan dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Dari tabel 3.5.3 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran ketiga ini tidak dapat disajikan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini dikarenakan *Hasil Penilaian Implementasi RB Pemerintah Kab. Bone oleh KemenPANRB untuk tahun 2020*, belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerja pada tahun 2020.

Berdasarkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kab. Bone yang terakhir diperoleh pada tahun 2018, masih berada pada kategori C (36,72). Nilai capaian kinerja sasaran ini berdasarkan data terakhir dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Jika mengacu pada hasil sementara penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap 10 (sepuluh) OPD yang menjadi sampel, Indeks RB untuk Tahun 2020 justru mengalami penurunan dan berada pada kategori D (Sangat Kurang) dengan nilai 24,08.

Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini yang cenderung menurun selama tahun 2018-2020, masih sangat jauh dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kab. Bone diharapkan berada pada kategori BB (>70-80) seperti tersaji pada tabel 3.7.3.



Kegagalan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh masih lemahnya komitmen dan kerja sama dari seluruh Aparat Pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk meningkatkan kinerja terkait implementasi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 Area Perubahan. Disamping itu, pembinaan dan pengawasan internal yang belum optimal dalam mendorong terselenggaranya reformasi birokrasi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan tindak lanjut terkait hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya, disamping masih kurangnya pemahaman aparat pemerintahan daerah terkait pentingnya peningkatan indeks reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan internal seluruh OPD dan Pemerintah Desa dalam Lingkup Pemerintahan Kab. Bone, dalam bentuk penjaminan mutu (audit internal) dan jasa konsultatif (pendampingan/asistensi), serta koordinasi yang lebih baik dengan Bagian Organisasi Setda Kab. Bone, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan reformasi birokrasi.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.8.3
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.581.358.500,-	Rp. 2.203.804.200,-	85 %
		1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 2.479.208.500,-	Rp. 2.154.354.200,-	87 %
		2. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
		3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Rp. 61.050.000,-	Rp. 45.850.000,-	75 %
		4. Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Rp. 37.500.000,-	Rp. 0,-	0 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan*



Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya Reformasi Birokrasi agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan internal dalam bentuk monitoring dan evaluasi serta asistensi atas penerapan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone sebagai bentuk penjaminan kualitas dan jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan), dengan berpedoman pada dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, dari aspek pelaksanaan evaluasi/penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi, masih diperlukan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan seluruh OPD lingkup pemerintahan daerah Kab. Bone terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi. Diantaranya, melalui Perencanaan diklat/bimtek ataupun Pelatihan Kantor Sendiri untuk pelaksanaan evaluasi/penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi bagi seluruh Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone, termasuk dalam pemberian jasa konsultasi berupa pendampingan/asistensi bagi OPD.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 3

*Tabel 3.9.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 3*

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2020	85 %	-

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini tidak dapat diperoleh pengukurannya. Hal ini dikarenakan data realisasi kinerja berupa *Hasil Penilaian Implementasi RB Pemerintah Kab. Bone oleh KemenPANRB untuk tahun 2020*, belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerjanya untuk dapat diperbandingkan dengan persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja sasaran ini.



4. SASARAN KE-EMPAT :

Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 4

Tabel 3.5.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang) ($2 \leq \text{Nilai} < 3$)	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	90%	99,77%	111 % (Sangat Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 4

Tabel 3.6.4
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 4 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Level 1 (Rintisan)	Level 1 (Rintisan)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	99,77%	99,77%	80%

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 4

Tabel 3.7.4
Capaian Kinerja Sasaran 4-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinsi)	Level 1 (Rintisan)	43 % (Sangat Kurang)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	99%	99,77%	101 % (Baik)



4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 4

Capaian kinerja hingga tahun 2020 terkait dengan Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Kab. Bone ini masih jauh dari target Pemerintah Pusat yang menargetkan peningkatan maturitas SPIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan standar nasional yang minimal harus berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan range penilaian pada angka $3 \leq \text{Nilai} < 4$, berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian (Quality Assurance-QA) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara untuk capaian kinerja terkait dengan Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN), tidak ada standar nasional yang harus dicapai, namun menjadi salah satu prioritas nasional untuk diwujudkan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 4

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu :

1. *Untuk indikator Tingkat Maturitas SPIP, diperoleh dari hasil evaluasi atau penilaian (Quality Assurance-QA) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penyelenggaraan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab. Bone.*
2. *Untuk indikator Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN), diperoleh dari data jumlah OPD dan Pemerintahan Desa yang memiliki Kasus Tindak Pidana KKN yang telah terbukti dan diputuskan bersalah (sudah inkra atau berkekuatan hukum yang tetap) melalui keputusan pengadilan untuk setiap tahunnya.*

Analisis pencapaian target kinerja untuk sasaran keempat ini untuk kedua indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

✓ Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kab. Bone :

Realisasi capaian kinerja untuk sasaran keempat ini tidak dapat disajikan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Hasil Evaluasi/Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP untuk tahun 2020 belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerja pada tahun 2020.



Berdasarkan hasil penilaian (*Quality Assessment-QA*) BPKP pada tahun 2014 yang sudah tervalidasi dengan Laporan No. LAP-1116/PW21/3/2014 Tanggal 29 Desember 2014, diperoleh realisasi pencapaian terakhir indikator kinerja ini masih berada Level 1 (terdefinisi) dengan nilai 1,92. Namun demikian, pada tahun 2019 telah dilakukan Evaluasi/Penilaian Mandiri (QA) oleh Tim Assessor Inspektorat Daerah Kab. Bone (LHP No. 793.04/540/SPIP/XII/ITDA, Tgl. 7 Desember 2018) dengan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk bimbingan teknis Penilaian Mandiri Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP (Laporan BPKP No. LBA-806/PW21/3/2018, Tgl. 17 desember 2018). Hasil sementara penilaian mandiri ini yaitu Skor 3,083 atau telah berada pada Level 3 - Terdefinisi ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$), namun hasil ini masih dalam proses Review BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan belum dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga belum bisa dijadikan data realisasi yang tervalidasi untuk capaian pada tahun 2020.

Dikarenakan data terakhir hasil penilaian maturitas SPIP yang tervalidasi hanya diperoleh pada tahun 2014, dan hingga tahun 2020 belum ada hasil penilaian yang tervalidasi sesuai kriteria indikator, maka perkembangan capaian kinerja indikator ini dapat dikatakan belum mengalami perubahan signifikan selama tahun 2018-2020, sebagaimana tersaji pada tabel 3.6.4.

Kondisi capaian kinerja yang stagnan untuk sasaran strategis ini selama tahun 2018-2019, masih jauh dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, seperti tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.4, dimana dalam rentang periode tahun 2018-2023, diharapkan tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone dapat mencapai Level 3 (terdefinisi) dengan range hasil penilaian $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$.

Perkembangan capaian kinerja hingga tahun 2020 ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada praktek pengendalian internal, namun pendekatan resiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan belum terorganisasi dengan baik, cenderung tanpa komunikasi dan pemantauan berkala sehingga kelemahan belum teridentifikasi dengan baik dan memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Kegagalan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh masih lemahnya komitmen dan kerja sama dari seluruh Aparat Pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk meningkatkan kinerja terkait penyelenggaraan SPIP yang baik dan lebih memadai dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, pembinaan dan pengawasan internal yang belum optimal dalam mendorong terselenggaranya penyelenggaraan SPIP yang lebih baik dan memadai.

Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman aparat pemerintahan daerah terkait pentingnya penyelenggaraan SPIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, sehingga pengorganisasian perangkat daerah belum berjalan dengan baik melalui pendekatan resiko dan pengendalian kinerja yang tersistematis untuk meminimalisir terjadinya kelemahan-kelemahan dalam proses pencapaian kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan daerah.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan internal seluruh OPD dalam Lingkup Pemerintahan Kab. Bone, dalam bentuk penjaminan mutu (audit internal) dan jasa konsultatif (pendampingan/asistensi), dengan tujuan untuk mendorong peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP guna terwujudnya tata kelola pemerintahan Kab. Bone yang baik dan bersih.

✓ *Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) :*

Berdasarkan data terakhir yang diolah dari data penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Kehakiman/Pengadilan), diperoleh kondisi bahwa selama tahun 2020, proporsi atau persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan KKN sebesar 99,77% (dari jumlah total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes), dimana hanya terdapat 1 (satu kasus) tindak pidana KKN yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kab. Bone yang penanganannya telah diproses di pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut adalah Penyimpangan Dana Anggaran PAUD pada Dinas Pendidikan Kab.



Bone dalam Proyek Pengadaan Buku untuk Semua Siswa TK di Bone selama 2017-2018, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 4.916.305.000,- sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bila dibandingkan dengan target kinerja indikator pada tahun 2020, sebagaimana tersaji pada tabel 3.5.4, maka kondisi capaian kinerja indikator sebesar 99,77% ini telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 95% OPD/PemDes yang Bersih dari Temuan KKN, atau dengan kata lain ***tingkat capaian kinerjanya sebesar 111% dengan kategori Sangat Baik (>100%)***.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, maka kondisi capaian kinerja ini dapat dipertahankan, sebagaimana tersaji pada tabel 3.6.4., dimana capaian kinerja pada tahun 2020 sama dengan capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator sasaran ini.

Perkembangan capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis ini selama tahun 2018-2020, masih memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, seperti tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.4, dimana dalam rentang periode tahun 2018-2023, diharapkan persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan KKN tidak kurang dari angka 99% dari total jumlah OPD dan Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kab. Bone.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini masih harus terus dipertahankan dan hal ini banyak ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh aparat pemerintahan daerah dan juga pemerintah desa, untuk menjaga tata kelola penyelenggaraan daerah agar selalu bersih dari potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara atau daerah.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sementara dalam proses penanganan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dan belum sampai kepada proses pengadilan, sehingga potensi kegagalan pencapaian target indikator kinerja ini bisa terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Kasus-kasus dugaan tindak pidana KKN yang banyak ditangani oleh APH hingga saat ini, khususnya pada tahun 2020, umumnya lebih banyak yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana desa (APBDes) oleh kepala desa/perangkat desa, sementara yang terjadi di OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone, sangat minim.



Secara umum, permasalahan tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman aparat pemerintahan daerah khususnya pemerintah desa terkait pentingnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelenggaraan SPIP yang memadai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, sehingga pengorganisasian perangkat daerah dan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik melalui pendekatan resiko dan pengendalian kinerja yang sistematis untuk meminimalisir terjadinya kelemahan-kelemahan yang mengarah pada tindak pidana KKN.

Namun, hal ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kab. Bone kedepannya, dan setiap kasus dugaan tindak pidana KKN tetap dalam pemantauan dan dijadikan salah satu faktor resiko dalam menyusun kebijakan perencanaan pembinaan dan pengawasan internal, khususnya oleh Inspektorat Daerah, agar kasus-kasus serupa seminimal mungkin dapat dicegah untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan KKN.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Tabel 3.8.4
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 4

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.581.358.500,-	Rp. 2.203.804.200,-	85 %
		1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 2.479.208.500,-	Rp. 2.154.354.200,-	87 %
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	2. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
		3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Rp. 61.050.000,-	Rp. 45.850.000,-	75 %
		4. Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Rp. 37.500.000,-	Rp. 0,-	0 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja kedua indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Pengawasan*



Internal Secara Berkala, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan, dan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai yang disertai peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan KKN. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan internal dalam bentuk penjaminan kualitas/quality assurance (audit/reviu/evaluasi/pemantauan) dan jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan), dengan berpedoman pada dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 dengan output berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan juga melalui koordinasi dengan institusi terkait, khususnya dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindak pidana KKN.

Tabel 3.15

*Jumlah LHP berdasarkan Jenis Kegiatan Pengawasan Internal Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kab. Bone*

JENIS KEGIATAN PENGAWASAN INETRNAL	JUMLAH LHP T. A. 2020
AUDIT	179 LHP
REVIU	89 LHP
EVALUASI	105 LHP
MONITORING /PEMANTAUAN	47 LHP
PEMERIKSAAN KHUSUS	42 LHP
PENGAWASAN LAINNYA / JASA KONSULTASI	5 LHP
JUMLAH TOTAL	467 LHP

Sumber Data : Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020.

Dari tabel 3.15 tersebut di atas, terlihat jumlah Kegiatan Pengawasan (yang terbanyak dilakukan dalam bentuk audit) berdasarkan penugasan yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 mencapai 467 LHP sebagai outputnya. Jumlah LHP yang begitu banyak dihasilkan dikarenakan begitu besarnya wilayah kerja pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone serta amanah yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan pengawasan yang dibebankan oleh pemerintah pusat terkait dengan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan atas pemanfaatan anggaran untuk penanganan Wabah Covid-19 didalamnya.



Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja berupa Laporan Hasil Pengawasan, permasalahannya adalah waktu penyelesaian dan kualitas laporan hasil pengawasan yang kedepannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui penerapan kendali mutu pengawasan sesuai dengan pedoman kendali mutu yang telah ditetapkan di dalam setiap penugasan tim pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini banyak dipengaruhi oleh masih terbatasnya aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dibandingkan dengan beban kerja pengawasan yang begitu padat dengan wilayah kerja yang begitu luas, sehingga peningkatan kuantitas dan kapasitas Aparat Pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal harus terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 4

Tabel 3.9.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 4

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2020	85 %	-
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	111 %	85 %	26 %

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja indikator pertama dari sasaran ini tidak dapat diperoleh pengukurannya. Hal ini dikarenakan data realisasi kinerja berupa *Hasil Penilaian Maturitas SPIP untuk tahun 2020 oleh BPKP*, belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerjanya untuk dapat diperbandingkan dengan persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja sasaran ini. Sementara untuk Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja indikator kedua dari sasaran ini sangat baik dengan nilai efisiensi sebesar 26%, dimana realisasi penggunaan anggarannya lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 111%).



5. SASARAN KE-LIMA :

Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 5

Tabel 3.5.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
5.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95%	100%	105 % (Sangat Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 5

Tabel 3.6.5
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 5 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
5.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100%	100%	85%

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 5

Tabel 3.7.5
Capaian Kinerja Sasaran 5-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
5	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100%	100%	100 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 5

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 5 ini, namun secara normatif indikator ini wajib untuk dioptimalkan pencapaiannya sebagai salah satu indikator dalam penilaian indeks reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dimana penanganan pengaduan masyarakat menjadi salah satu bagian dari 8 area perubahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 5

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu penetapan target kinerja setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi jumlah laporan pengaduan yang maksimal bisa diterima dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kegiatan dan aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang kompeten dalam penanganan pengaduan masyarakat sifatnya insidental dan relatif waktu penyelesaiannya. Selain itu, pengaduan masyarakat yang masuk harus memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai pengaduan yang dapat ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping mempertimbangkan petunjuk/arahan dari Bupati Bone.

Dari tabel 3.5.5 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini sudah optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap laporan pengaduan masyarakat senilai 100% dari target 95% pada tahun 2019, atau **tingkat capaian kinerjanya sebesar 105%, dengan kategori Baik (>100 %)**.

Terdapat 5 kasus pengaduan masyarakat yang telah diterima pada tahun 2020, dan telah ditangani penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Kasus-kasus tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan/perbuatan melawan hukum oleh oknum ASN dan Kepala Desa, pengaduan atas proses pengadaan barang/jasa, dan terganggunya pelayanan publik (*dapat dilihat pada lampiran*)

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel 3.6.5, pencapaian kinerja sasaran ini dapat dipertahankan, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap laporan pengaduan pada tahun 2020 sebesar 100%, seperti halnya pada tahun 2019. Pencapaian kinerja tahun 2020 juga masih sejalan dengan target jangka menengah sebesar 100% berdasarkan Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023 (tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.5).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini banyak dipengaruhi oleh masih cukup rendahnya laporan pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh Inspektorat Daerah. Rendahnya pelaporan pengaduan masyarakat ini berbeda dengan jumlah laporan pengaduan



masyarakat yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang umumnya terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang trennya mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Dalam banyak kasus, Inspektorat Daerah Kab. Bone juga dilibatkan oleh APH untuk konfirmasi atas laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada desa yang menjadi objek pengaduan. Bahkan dalam beberapa kasus, dilakukan pemeriksaan lapangan secara bersama-sama dengan APH untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atas permintaan APH.

Kedepannya juga perlu ditetapkan prosedur penanganan pengaduan masyarakat, khususnya yang terkait dengan mekanisme pelaporan kasus pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang menyangkut pelayanan publik. Hal ini menjadi catatan khusus yang menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk segera didorong penyusunan kebijakan daerah terkait pedoman penanganan pengaduan masyarakat, sehingga kedepannya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Daerah menjadi lebih terarah dan lebih optimal.

Komitmen ini juga telah ditunjukkan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP melalui koordinasi dan kerja sama dengan APH untuk penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana KKN yang sementara dalam proses hukum, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kab. Bone dengan Kejaksaan Negeri Watampone dan Kepolisian Resor Bone, Nomor : 012/PKS-Pemkab. Bone/VII/2018, Nomor : B-56/R.4.12/Fd.I/07/2018, dan Nomor : B/923/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, dan masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan PKS tersebut diatas, dalam pelaksanaannya, setiap laporan pengaduan masyarakat (khususnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana KKN) yang diterima oleh APH, akan diteruskan terlebih dahulu ke Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP untuk penanganan awal, yang selanjutnya akan diproses secara hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan penanganan kasus pengaduan masyarakat, khususnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana KKN, jumlah aparaturnya pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang kompeten dalam hal



pengawasan dan investigasi penanganan kasus, terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, disamping peningkatan upaya pencegahan melalui perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko yang mempertimbangkan objek-objek kasus pengaduan masyarakat yang berkembang di masyarakat baik melalui laporan pengaduan maupun informasi dari media pers dan APH.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Tabel 3.8.5
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 5

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp. 251.725.000,- Rp. 251.725.000,-	Rp. 212.362.927,- Rp. 212.362.927,-	84% 84%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah*.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat yang lebih intensif guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilaksanakan melalui pembentukan tim untuk penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan laporan yang diterima baik secara langsung maupun tidak, termasuk koordinasi dengan APH terkait dengan proses penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima oleh APH.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan mendasar dari segi penyerapan anggaran. Namun dari segi pelaksanaan kegiatan kedepannya, masih terdapat keterbatasan waktu dan personil untuk penanganan setiap kasus pengaduan masyarakat dikarenakan padatnya jadwal kegiatan pengawasan internal yang jadi beban kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping intensifnya permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pemeriksaan khusus yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan APBDesa.



Dalam proses penanganan kasus pengaduan masyarakat kedepannya, perlu ditetapkan mekanisme penanganan yang diselaraskan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mampu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada munculnya pengaduan masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah aparat pengawasan yang bersertifikasi dalam proses investigasi terkait penanganan pengaduan masyarakat, masih perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi padatnya jadwal kegiatan pengawasan rutin Inspektorat Daerah Kab. Bone.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 5

Tabel 3.9.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 5

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
5.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	105 %	84 %	21 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini terbilang baik dengan nilai efisiensi sebesar 21%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 84%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 105%).



6. SASARAN KE-ENAM :

Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 6

Tabel 3.5.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 - Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
6.	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95%	91,67%	96,5 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 6

Tabel 3.6.6
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 6 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
6.	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	91,67%	95%	85%

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 6

Tabel 3.7.6
Capaian Kinerja Sasaran 6-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
6.	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100%	91,67%	91,67 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 6

Tidak ada standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Sasaran 6 ini, namun secara normatif indikator ini wajib untuk dioptimalkan pencapaiannya sebagai salah satu indikator dalam penilaian indeks reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dimana penanganan kasus kepegawaian yang berdampak pada pelayanan publik menjadi salah satu bagian dari 8 area perubahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 6

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu penetapan target kinerja setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi jumlah kasus pengaduan yang maksimal bisa ditangani dengan mengacu pada data tahun sebelumnya serta memperhatikan ketersediaan anggaran kegiatan dan aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang kompeten dalam penanganannya yang sifatnya insidentil dan relatif waktu penyelesaiannya. Selain itu, kasus kepegawaian yang dapat ditangani juga harus memenuhi kriteria sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping mempertimbangkan petunjuk/arahan dari Bupati Bone.

Dari tabel 3.5.6 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini belum optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap kasus kepegawaian sebesar 91,67% dari target 95% pada tahun 2020, atau **tingkat capaian kinerjanya sebesar 96,5%, dengan kategori Baik (75-100 %)**. Pada tahun 2020, penanganan kasus kepegawaian yang mencapai jumlah 22 Kasus yang tertangani dari total 24 Kasus yang diterima. Namun, kasus kepegawaian yang ditangani umumnya hanya terkait dengan permohonan izin perceraian PNS dan hanya 1 Kasus yang terkait dengan pelanggaran disiplin ASN.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel 3.6.6, pencapaian kinerja sasaran ini mengalami penurunan, dimana tingkat penanganan/penyelesaian kasus kepegawaian pada tahun 2020 sebesar 91,67%, sementara pada tahun 2019 mencapai 95%. Dan pencapaian kinerja hingga tahun 2020 ini belum sejalan dengan target jangka menengah sebesar 100% berdasarkan Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018 (tersaji pada tabel 3.4 dan tabel 3.7.5).

Kondisi pencapaian target kinerja sasaran ini yang tidak sesuai target kinerja pada tahun 2020, dipengaruhi oleh kasus kepegawaian terkait permohonan izin perceraian ASN yang tersisa, diterima pada akhir tahun anggaran (Bulan Desember), sehingga tidak sempat untuk dapat ditangani. Selain itu, padatnya jadwal pengawasan rutin dan lebih prioritas pada akhir tahun juga berpengaruh terhadap penanganan kasus kepegawaian yang tersisa untuk dapat ditangani dengan cepat.



6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Tabel 3.8.6
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 6

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Rp. 131.250.000,- Rp. 131.250.000,-	Rp. 128.350.000,- Rp. 128.350.000,-	98% 98%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya*.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penanganan kasus kepegawaian guna terciptanya kepastian hukum bagi PNS dan masyarakat serta penegakan disiplin PNS dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, yang secara tidak langsung mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Hal ini dilaksanakan melalui pembentukan tim penanganan kasus kepegawaian berdasarkan permohonan/laporan yang diterima secara langsung.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan ataupun hambatan dari segi penyerapan anggaran, hanya terhambat oleh keterbatasan waktu penanganan seluruh kasus yang diterima, ditengah padatnya jadwal pengawasan rutin dan lebih prioritas untuk pelaksanaannya.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 6

Tabel 3.9.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 6

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
6.	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	96,5 %	98 %	-1,5 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini terbilang kurang dengan nilai inefisiensi sebesar -1,5%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 98%) lebih besar nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 96,5%).



7. SASARAN KE-TUJUH :

Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 7

*Tabel 3.5.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 - Tahun 2020*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
7.	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	60%	58%	96,7 % (Baik)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 7

*Tabel 3.6.7
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 7 - Tahun 2018-2020*

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
7.	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	58%	43%	45%

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 7

*Tabel 3.7.7
Capaian Kinerja Sasaran 7-Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
7.	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	90%	58%	64,44 % (Kurang)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 7

Tidak terdapat standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan indikator Sasaran 4 ini, namun dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dimonev oleh KPK-RI, pemenuhan kebutuhan aparatur pengawasan menjadi salah satu target kinerja yang harus dipenuhi melalui penambahan setiap tahunnya sesuai kebutuhan organisasi.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 7

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan pada Inspektorat Daerah, didasarkan jumlah pejabat fungsional pengawasan yang ada dibandingkan dengan total kebutuhan berdasarkan hasil analisa perhitungan kebutuhan terhadap beban kerja pengawasan Inspektorat Daerah.

Jabatan Fungsional Pengawasan, yang terdiri dari Auditor Keuangan (disebut Auditor saja dalam pelaksanaan tugasnya) dan Auditor Kepegawaian, beserta Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) memegang peran strategis dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga kompetensinya perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas serta profesionalismenya.

Dari tabel 3.5.7 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sasaran ini belum mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana jumlah Aparat Pengawasan yang bersertifikat ahli (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD) mencapai jumlah 51 orang atau sebesar 58% dari target 60% terhadap jumlah total kebutuhan (88 Orang) Pejabat Fungsional Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan ***tingkat capaian kinerja sebesar 96,7% dan dikategorikan Baik (75-100%)***.

Pencapaian kinerja tahun 2020 untuk indikator kinerja sasaran keempat ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 (lihat tabel 3.6.7) yang sebelumnya hanya mencapai persentase 43% (38 Orang). Hal ini disebabkan karena adanya tambahan Pejabat Fungsional Pengawasan P2UPD melalui proses inpassing dan juga Pengangkatan Auditor dari seleksi CPNS.

Terhadap target indikator kinerja dalam Renstra Tahun 2013-2018 (tersaji pada tabel 3.7.7), tingkat capaian kinerja sasaran ini hingga tahun 2020 masih cukup jauh dari target jangka menengah, yang ditargetkan persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone mencapai 90% (80 Orang) dari total kebutuhan organisasi.



Lebih terinci, data jumlah pejabat fungsional APIP (Auditor & P2PD) serta kebutuhannya pada Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL										
	Pertama		Muda		Madya		Utama		Jumlah		Selisih
	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	
JF-Auditor	6	32	12	16	12	5	0	2	30	55	- 25
JF-Auditor Kepegawaian	2	2	1	2	0	1	0	1	3	5	- 2
JF-P2UPD	0	16	4	8	11	3	-	-	15	28	- 13
JUMLAH TOTAL	8	50	17	26	23	9	0	3	48	88	- 40
Calon Auditor (bersertifikat)									3		
Calon Audiwan (bersertifikat)									-		
Calon P2UPD (bersertifikat)									-		
Keterangan : B = Kondisi SDM yang ada K = Kebutuhan SDM											

Keterangan : B = Kondisi SDM yang ada K = Kebutuhan SDM

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN dan Hasil Analisis Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019

Perhitungan kebutuhan pejabat fungsional Auditor dan P2UPD berpedoman pada Perka BPKP No. KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP dan S.E. Kepala BPKP No. S-711/K/JF/2019 tentang Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP yang berdasarkan pada analisa beban kerja pengawasan yang mengacu pada Kegiatan Rutin Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan & kegiatan Pengawasan lainnya) yang diatur dalam PKPT Inspektorat Daerah Kab. Bone dan Kebijakan Pengawasan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahunnya, serta memperhitungkan wilayah kerja pengawasan yang besar jumlahnya dan lokasi yang luas. Dari hasil analisa diperoleh data kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk jabatan fungsional Auditor dan P2UPD, sebagai berikut :

1. Jumlah Total Beban Kerja Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan Total Hari Pemeriksaan (HP) sebesar 16.731 berada pada Kategori B2 (HP >14.300-16.900)
2. Jumlah Gugus Tugas (GT) yang diperlukan berdasarkan data jumlah total beban kerja pengawasan = 8 GT (1 GT = 1 Pengendali Teknis + 3 Ketua Tim + 9 Anggota Tim) + 3 Pejabat Fungsional Tingkat Utama.



Tabel 3.17
Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENJANG JAB. FUNGSIONAL PENGAWASAN	PERAN DALAM TIM	KEBUTUHAN SDM	KONDISI SDM
Auditor/P2UPD Tingkat Utama	Pengendali Mutu (PM)	3 Orang	-
Auditor/P2UPD Tingkat Madya	Pengendali Teknis (PT)	8 Orang	23 Orang
Auditor/P2UPD Tingkat Muda	Ketua Tim (KT)	24 Orang	16 Orang
Auditor/P2UPD Tingkat Pertama	Anggota Tim (AT)	48 Orang	6 Orang
Auditor Kegawaian (Audiwan)	(PT/KT/AT)	5 Orang	3 orang
Calon Auditor Pertama (Bersertifikat)	Anggota Tim (AT)	-	3 orang
Jumlah SDM Pengawasan		88 Orang	51 Orang
Kekurangan SDM Pengawasan		37 Orang	

Untuk penetapan formasi kebutuhan auditor kepegawaian sebagaimana tersaji pada tabel 3.17 diatas, diatur tersendiri dengan mengacu pada Permen PAN-RB No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dimana dalam pasal 37 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa penetapan formasi Audiwan, didasarkan pada jumlah instansi dan luas wilayah yang menjadi beban tugas serta paling banyak 5 (lima) orang untuk lingkungan Kabupaten/Kota, tanpa melihat peran jabatan dalam tim.

Kesulitan dalam pencapaian target kinerja sasaran ini banyak dipengaruhi oleh proses rekrutmen SDM pengawasan pada Inspektorat Daerah yang belum optimal, serta regulasi persyaratan untuk pembentukan jabatan fungsional pengawasan yang cukup berat khususnya dari segi masa pengalaman kerja di bidang pengawasan untuk dapat segera diangkat ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, beberapa Pejabat Fungsional akan segera memasuki masa pensiun dalam 2 hingga tahun terakhir.

Mengingat masih terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah (sekitar 58% dari total kebutuhan) dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka kedepannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone. Proses penambahan SDM Pengawasan ini akan ditempuh melalui usulan rekrutmen PNS melalui formasi CPNS dan juga melalui proses inpassing (perpindahan/penyesuaian dari jabatan lainnya).



6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Tabel 3.8.7
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 7

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
7.	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Rp. 335.020.000,-	Rp. 321.695.059,-	96 %
		1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Rp. 310.000.000,-	Rp. 301.975.059,-	97 %
		2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp. 25.020.000,-	Rp. 19.720.000,-	79 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan* melalui *Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan dan Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja*.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah meningkatkan Profesionalisme SDM Pengawasan Inspektorat Daerah melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitasi Kegiatan Diklat untuk Pembentukan/Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawasan dan Diklat/Bimtek Substantif untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi SDM Pengawasan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, terutama adalah belum optimalnya perencanaan diklat dan bimtek serta PKS bagi Aparat Pengawasan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan SDM dan Anggaran, dan juga waktu pelaksanaan diklat/bimtek ditengah-tengah pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal yang begitu padat berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kab. Bone yang secara khusus bertugas untuk menangani program dan kegiatan bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawasan yang ada, sehingga kedepannya perencanaan diklat dan bimtek serta PKS bagi Aparat Pengawasan jadi lebih memadai.



Kondisi eksternal yang juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek pada tahun 2020 adalah adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penyesuaian anggaran dan target kinerja untuk pelaksanaan diklat/bimtek. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kegiatan membatasi jumlah kegiatan diklat/bimtek secara tatap muka, sehingga beberapa kegiatan harus dilaksanakan dalam bentuk daring (online) melalui aplikasi *online meeting*. Namun hal ini hanya berpengaruh pada perubahan kebutuhan anggaran dan target jumlah kegiatan diklat/bimtek yang bisa diikuti selama tahun 2020.

Kondisi wabah Covid-19 yang masih akan berlanjut dan berdampak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya juga harus diantisipasi dan menjadi pertimbangan dalam Perencanaan diklat/bimtek kedepannya, agar peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone tetap terselenggara sesuai kebutuhan organisasi.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 7

Tabel 3.9.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 7

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
7.	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	96,7 %	96 %	0,7 %

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini sangat kecil dengan nilai efisiensi hanya sebesar 0,7%, dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 96%) lebih kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerjanya (sebesar 96,7%). Namun hal ini sudah sejalan dengan realisasi dan kebutuhan anggaran yang memang sangat diperlukan dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.



8. SASARAN KE-DELAPAN :

Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Sasaran 8

Tabel 3.5.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 - Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
8.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 8

Tabel 3.6.8
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 8 - Tahun 2018-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2020	2019	2018
8.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Belum Ada Hasil Penilaian dari BPKP untuk Tahun 2020	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	Level 2 (Infrastructure)

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dari Sasaran 8

Tabel 3.7.8
Capaian Kinerja Sasaran 8-Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	REALISASI S.D. 2020	CAPAIAN KINERJA
8.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Penuh	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	83,33 % (Baik)

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 8

Capaian kinerja terkait dengan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum sepenuhnya tercapai. Secara nasional, Pemerintah Pusat menetapkan standar bahwa Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah minimal harus berada pada Level 3 (Integrated) penuh, sementara capaian terakhir pada tahun 2019 (belum ada hasil penilaian untuk tahun 2020), kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone masih berada pada Level 3 Dengan Catatan Perbaikan.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 8

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini yaitu, realisasi capaian kinerja diperoleh dari Hasil Evaluasi atau Penilaian Jaminan Mutu (Quality Assurance) oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah, yang mengacu pada Standar IACM (Internal Audit Capability Model), dimana terdapat 6 elemen penilaian yang meliputi aspek Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran kedelapan ini tidak dapat disajikan sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal ini dikarenakan *Evaluasi/Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP untuk tahun 2020* tidak terlaksana akibat kondisi Pandemi Covid-19, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerja pada tahun 2020.

Proses penilaian atau Quality Assurance (QA) terakhir atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember Tahun 2019, namun Laporan Hasil Quality Assurance juga belum dirilis dari BPKP hingga saat pelaporan ini,

Namun berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, No. LQAPIP-878/PW21/6/2018 Tanggal 31 Desember 2018 yang diterima pada Maret Tahun 2019, diperoleh hasil bahwa Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone telah berada pada Level 3 Dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, hanya 4 Elemen yang sudah berada pada Level 3, dan 2 Elemen lainnya masih berada pada Level 2, sebagaimana uraian berikut ini :

NO.	ELEMEN KAPABILITAS APIP	LEVEL SAAT INI
1	2	3
1.	PERAN DAN LAYANAN	3
2.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
3.	PRAKTIK PROFESIONAL	2
4.	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	3
5.	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	3
6.	STRUKTUR TATA KELOLA	3



Namun, perkembangan capaian kinerja untuk sasaran ini selama tahun 2018-2020, belum sepenuhnya memenuhi pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023, yaitu Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah sudah harus berada pada Level 3 Penuh, sebagaimana tersaji pada tabel 3.7.8. Pada kondisi Level 3 secara penuh ini, Inspektorat Daerah selaku APIP diharapkan telah mampu memberikan jaminan mutu bagi terciptanya 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta mampu memberikan jasa konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi pencapaian kinerja sasaran ini hingga tahun 2020 ini yang belum optimal dipengaruhi oleh :

1. Komitmen dan kerja sama dari seluruh Pegawai Inspektorat Kab. Bone yang masih perlu dioptimalkan untuk mencapai peningkatan Kapabilitas APIP;
2. Koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berjalan baik, masih perlu dioptimalkan dalam proses pendampingan/asistensi untuk peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Bone.

Namun demikian, konsistensi dalam peningkatan kapabilitas APIP ini juga menjadi hal penting untuk lebih dioptimalkan oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mencapai tingkat kapabilitas APIP pada Level 3 secara penuh, khususnya pada elemen pengelolaan SDM dan praktik profesional yang masih berada pada Level 2, sebagai catatan perbaikan kedepannya.

Secara umum, hal ini terjadi karena proses pengendalian internal terkait dengan pengelolaan SDM dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan internal belum terlaksana secara optimal dan memadai, khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemberlakuan kendali mutu pengawasan.

Kondisi ini menjadi fokus perhatian bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya untuk terus melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan kinerja Tim Kerja atau Satuan Tugas yang telah dibentuk yang melibatkan seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan BPKP selaku instansi pembina APIP.



6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 8

Tabel 3.8.8
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 8

N O	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
8.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 30.900.000,-	Rp. 14.920.000,-	48 %
		1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Rp. 30.900.000,-	Rp. 14.920.000,-	48 %
		Program Penunjang Pemerintahan Umum (2 Kegiatan)	Rp. 32.712.500,-	Rp. 29.751.250,-	91 %
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2 Kegiatan)	Rp. 3.361.500,-	Rp. 635.250,-	17 %
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (8 Kegiatan)	Rp. 746.498.000,-	Rp. 689.471.379,-	92 %
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (6 Kegiatan)	Rp. 944.203.950,-	Rp. 793.609.321,-	84 %
JUMLAH			Rp. 1.757.975.950,-	Rp. 1.528.387.200,-	87 %

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* melalui *Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan*, yang ditunjang oleh *Program dan Kegiatan Rutin* sebagaimana tersaji pada *tabel 3.8.8* diatas.

Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mendorong terciptanya peningkatan Kapabilitas APIP secara menyeluruh dalam segala aspek tata kelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bone, sehingga tercipta Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan dari segi penyerapan anggaran, namun terkendala oleh kondisi Wabah Covid-19 yang menyebabkan proses assessment kapabilitas APIP oleh BPKP pada tahun 2020. Namun pada tataran pelaksanaan kegiatan, tetap dilakukan aktivitas pemenuhan dokumen infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3. Optimalisasi kinerja Tim atau Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya



menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mendorong agar proses Assessment atau Quality Assurance (QA) oleh BPKP dapat dilakukan lebih cepat dari pelaksanaan sebelumnya yang cenderung dilakukan pada akhir-akhir tahun anggaran, khususnya yang terkait dengan pemenuhan dokumen-dokumen infrastuktur yang akan menjadi objek penilaian dalam proses QA Kapabilitas APIP dan harus diupdate setiap tahunnya.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 8

Tabel 3.9.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 8

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
8.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Tidak Dapat diukur Capaian Kinerjanya untuk Tahun 2020	48 %	-

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini tidak dapat diperoleh pengukurannya. Hal ini dikarenakan data realisasi kinerja berupa *Hasil Penilaian/Assesment Kapabilitas APIP oleh BPKP* yang terakhir dilakukan pada tahun 2019, hingga tahun 2020 ini belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaian kinerjanya untuk dapat diperbandingkan dengan persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja sasaran ini.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Gambaran Umum Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah APBD Kab. Bone T.A. 2020. Nilai pagu anggaran tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan 2020

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran-DPPA)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	% Kenaikan/(Penurunan)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 6.203.054.601,-	Rp. 8.512.795.609,-	37,24 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.365.790.000,-	Rp. 5.057.329.450,-	50,26 %
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 16.300.000,-	100%
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.213.540.000,-	Rp. 4.818.529.450,-	49,94 %
- Belanja Modal	Rp. 152.250.000,-	Rp. 222.500.000,-	46,14 %
TOTAL ANGGARAN	Rp. 9.568.844.601,-	Rp. 13.570.125.059,-	41,82 %

Perbandingan alokasi anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2018-2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab. Bone T.A. 2018-2020

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN BELANJA		
	DPPA Itda	APBD-P Kab. Bone	% Terhadap APBD
2018	Rp. 7.668.991.531,-	Rp. 2.353.404.828.655,-	0,33 %
2019	Rp. 9.568.844.601,-	Rp. 2.526.979.745.701,-	0,38 %
2020	Rp. 13.570.125.059,-	Rp. 2.473.507.116.885,-	0,55 %

Secara proporsional, telah ada peningkatan anggaran yang sangat signifikan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meski belum sepenuhnya memadai bila dibandingkan dengan beban kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP dengan nilai ideal minimal 0,5% dan diatas Rp. 15 Milyar, sesuai regulasi yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Awalnya nilai anggaran ini telah dipenuhi pada APBD Pokok T.A. 2020. Kondisi wabah pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada keuangan daerah, menyebabkan nilai anggaran Inspektorat Daerah harus dikurangi melalui Refokusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19, dan juga dilakukan penyesuaian target kinerja program/kegiatan sesuai prioritas organisasi.



Realisasi Keuangan Tahun 2020

Adapun realisasi keuangan belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun anggaran 2020 mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar **Rp. 12.737.271.768,-** atau **93,86 % dari total pagu anggaran**, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp. 8.512.795.609,-	Rp. 8.342.672.382,-	98,00 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 5.057.329.450,-	Rp. 4.394.599.386,-	86,90 %
- Belanja Pegawai	Rp. 16.300.000,-	Rp. 14.700.000,-	90,18 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 4.818.529.450,-	Rp. 4.157.399.386,-	86,28 %
- Belanja Modal	Rp. 222.500.000,-	Rp. 222.500.000,-	100 %
JUMLAH	Rp. 13.570.125.059,-	Rp. 12.737.271.768,-	93,86 %

Pemanfaatan Anggaran Tahun 2020

Pemanfaatan anggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang sepenuhnya bersumber dari DAU APBD Kab. Bone T.A. 2020, tergambar secara umum pada tabel 3.15 diatas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1) *Belanja Tidak Langsung*

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.342.672.382,- (98%), digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama satu tahun anggaran, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) & Tunjangan Beban Kerja bagi setiap ASN berdasarkan kelas jabatan masing-masing.

2) *Belanja Langsung*

Realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.394.599.386,- (87%), digunakan untuk pelaksanaan 7 program dan 27 kegiatan pada tahun 2020. Realisasi anggaran terbesar untuk belanja langsung, dipergunakan untuk pelaksanaan program prioritas yaitu *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.964.333.500,- (59%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.544.517.127,- atau 86% dari Pagu Anggaran Program tersebut.

Realisasi penggunaan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan beserta realisasi kinerja yang ingin dicapai, secara terinci dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :



Tabel 3.21. Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/4)x100%	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)=(6-9)
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	65 %	53,03 %	81,58 %	Rp. 2.581.358.500,-	Rp. 2.203.804.200,-	85 %	-3,42 %
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah		• Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %	46,97%	49,44 %				
		• Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan): - BPK-RI - APIP (BPKP, ItProv, ItKab)	- 85 % - 85 %	- 81,00 % - 81,35 %	- 95,29 % - 95,71 %				
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda		• Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	>50-60	24,08	48,16 %				
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN		• Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) • Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	60 % 400	5,13 % 437	9 % 109 %				
	➢ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	Rp. 2.479.208.500,-	Rp. 2.154.354.200,-	87 %	13 %
	➢ Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %	0 %
	➢ Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	Rp. 61.050.000,-	Rp. 45.850.000,-	75 %	25 %
	➢ Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan Semesteran	-	0 %	Rp. 37.500.000,-	Rp. 0,-	0 %	0 %



SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/4)x100%	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)=(6-9)
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %	100 %	105 %	Rp. 251.725.000,-	Rp. 212.362.927,-	84 %	21 %
	➢ Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	Rp. 251.725.000,-	Rp. 212.362.927,-	84 %	16 %
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %	91,67 %	96,49 %	Rp. 131.250.000,-	Rp. 128.350.000,-	98 %	-2 %
	➢ Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	Rp. 131.250.000,-	Rp. 128.350.000,-	98 %	2 %
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan (Kebutuhan = 88 Org)	60 % (53 Orang)	58% (51 Org = 30 L + 21 P)	96,67 %	Rp. 335.020.000,-	Rp. 321.695.059,-	96 %	1 %
	➢ Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	110%	Rp. 310.000.000,-	Rp. 301.975.059,-	97 %	3 %
	➢ Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	1 PKS	1 PKS	100 %	Rp. 25.020.000,-	Rp. 19.720.000,-	79 %	21 %
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	83 % (5 dari 6 elemen)	67 % (4 dari 6 elemen)	80,72 %	Rp. 30.900.000,-	Rp. 14.920.000,-	48 %	32 %
	➢ Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Rp. 30.900.000,-	Rp. 14.920.000,-	48 %	52 %
	4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	Rp. 32.712.500,-	Rp. 29.751.250,-	91 %	9 %
	➢ Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	Rp. 16.712.500,-	Rp. 13.751.250,-	82 %	18 %



SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/4)x100%	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)=(6-9)
	➤ Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Website	1 Website	100 %	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-	100 %	0 %
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	Rp. 3.661.500,-	Rp. 635.250,-	17 %	83 %
	➤ Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	Rp. 1.361.000,-	Rp. 309.400,-	23 %	77 %
	➤ Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	Rp. 2.300.500,-	Rp. 325.850,-	14 %	86 %
	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	97 %	97 %	Rp. 746.498.000,-	Rp. 689.471.379,-	92 %	5 %
	➤ Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	4 Unit/Paket/Set	4 Unit/Paket/Set	100 %	Rp. 38.000.000,-	Rp. 38.000.000,-	100 %	0 %
	➤ Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	25 Unit/paket	25 Unit/paket	100 %	Rp. 154.500.000,-	Rp. 154.500.000,-	100 %	0 %
	➤ Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan	15 Buah	15 Buah	100 %	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	100 %	0 %
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	5 Paket	100 %	Rp. 356.448.000,-	Rp. 345.515.320,-	97 %	3 %
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	4 Paket	100 %	Rp. 146.350.000,-	Rp. 100.371.059,-	69 %	31 %
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	15 Paket	75 %	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.795.000,-	99,93 %	-25 %
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	12 Paket	100 %	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.890.000,-	99 %	1 %
	➤ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	12 Paket	100 %	Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.400.000,-	100 %	0 %
	7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	104 %	104 %	Rp. 944.203.950,-	Rp. 793.609.321,-	84 %	19 %



SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI KEUANGAN	EFISIENSI PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/4)x100%	(7)	(8)	(9)=(8/7)x100%	(10)=(6-9)
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	36 Paket	100 %	Rp. 33.810.000,-	Rp. 32.022.029,-	95 %	5 %
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	100 %	Rp. 79.920.000,-	Rp. 77.852.192,-	97 %	6 %
	➤ Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	4 Paket	100 %	Rp. 1.046.000,-	Rp. 1.046.000,-	100 %	0 %
	➤ Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	12 Paket	100 %	Rp. 15.840.000,-	Rp. 14.759.200,-	93 %	7 %
	➤ Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	57 Kegiatan	114 %	Rp. 609.350.000,-	Rp. 483.783.900,-	79 %	35 %
	➤ Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	36 Paket	100 %	Rp. 204.237.950,-	Rp. 184.246.000,-	90 %	10 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA TOTAL REALISASI ANGGARAN					93,44 %	Rp. 5.057.329.450,-	Rp. 4.394.599.386,-	87 %	6,44 %



3.3 HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

Penghargaan Yang Diterima Pada Tahun 2020

Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak mendapat penghargaan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya, agar kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah selaku APIP, bisa dioptimalkan melalui inovasi dan komitmen bersama seluruh ASN Inspektorat Daerah Kab. Bone. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan eksternal dan internal, serta inovasi dalam Tata Kelola Pengawasan Internal merupakan aspek kinerja yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat memperoleh penghargaan di level provinsi dan nasional.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020, masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, antara lain, yaitu :

1. Masih lemahnya komitmen Kepala OPD untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi atas temuan BPK-RI secara tuntas terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah dan RKPD Tahun 2020 serta RPJMD Periode Tahun 2018-2023;
2. Tingkat ketaatan/kepatuhan OPD dan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Desa, umumnya masih perlu ditingkatkan untuk terciptanya 3E (efektifitas, efisiensi, dan ekonomis) termasuk kesetaraan gender & disabilitas (inklusif) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Ketersediaan Aparat Pengawasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan yang terus meningkat serta luasnya wilayah kerja pengawasan Inspektorat Kab. Bone.
4. Tata Kelola Pengawasan pada Inspektorat Kab. Bone selaku APIP yang masih perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk memenuhi standar assessment yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPKP-RI, yaitu Level 3 (*integrated*) secara penuh sesuai dengan standar Internal Audit Capability Model (IACM).



Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun yang akan datang, diupayakan langkah-langkah progresif sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah), melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, dan Itprov. Sul-Sel di dalam prosesnya.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal akan lebih diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Pengelolaan APBDes, beserta Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dilakukan melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan penyedia jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa, serta perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dengan prinsip penganggaran "*Money Follow Program*".
3. Direncanakan peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab. Bone secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja pengawasan untuk rekrutmen pegawai dan perencanaan diklat dan bimtek bagi Aparatur Pengawasan khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal Implementasi SAKIP dan SPIP, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pengelolaan APBDes.
4. Akselerasi pelaksanaan rencana aksi Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 secara penuh oleh Tim Kerja Inspektorat Kab. Bone yang dibentuk untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan guna memenuhi seluruh standar *assessment* Kapabilitas Tata Kelola APIP beserta implementasinya dalam pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan, dan juga peningkatan kerja sama yang lebih intensif dengan BPKP-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 ini menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2020 yang merujuk pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah diperjanjikan oleh Inspektur Daerah kepada Bupati Bone.

Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab. Bone yang baik dan bersih, sebagaimana menjadi salah satu misi utama Pemerintah Kab. Bone dalam mewujudkan Visi Kab. Bone dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*”. Dalam mencapai misi dan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kab. Bone telah menetapkan target capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahunnya dengan prioritas utama pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam periode pemerintahan Bupati Bone Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 (hal. 25), diperoleh nilai persentase capaian kinerja dari 9 (sembilan) indikator kinerja atas 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ 3 Indikator Kinerja (IK) Sasaran yang memenuhi/melebihi target kinerja dengan % Capaian Kinerja $\geq 100\%$;
- ✓ 2 Indikator Kinerja (IK) Sasaran yang belum mencapai target kinerja dengan nilai % Capaian Kinerja $< 100\%$, namun tingkat capaiannya tergolong baik (diatas 90%) ;
- ✓ 4 Indikator Kinerja (IK) Sasaran yang tidak dapat diukur % capaian kinerjanya, dikarenakan data realisasi kinerja yang bersumber dari hasil evaluasi/penilaian (assessment) oleh instansi terkait belum diperoleh/dirilis hingga saat pelaporan ini.

Sasaran ke-3 yaitu “*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah*”, dan Sasaran ke-4 yaitu “*Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian*



Internal” merupakan sasaran yang indikator kinerjanya belum optimal pencapaian target kinerjanya hingga tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Daerah dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Hingga tahun 2020 ini, Indikator Kinerja sasaran ke-3, yaitu *“Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah”* masih berada pada kategori *C (36,72)* dari target *CC (>50-60)*, dan *secara nasional minimal harus berada pada kategori B (>60-70)*. Sementara, Indikator Kinerja Sasaran ke-4, yaitu *“Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”* masih berada pada kategori *Level 1 (Rintisan)* dari target *Level 2 (Berkembang)* hingga tahun 2020, dan *secara nasional minimal harus berada pada Level 3 (Terdefinisi)*.

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, terkait satu sama lain dan semuanya menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Namun dilihat dari besarnya nilai anggaran dan target indikator kinerja utama (IKU) yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka terdapat 3 program strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran keuangan sebagai input utama (selain SDM APIP), dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,44%, yang berarti terdapat efisiensi yang cukup signifikan bila diperbandingkan realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar 87% dengan tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai nilai 93,44%.

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun anggaran 2020, mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.737.271.768,- atau 93,86% dari total pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dari nilai penyerapan anggaran tersebut, realisasi belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.394.599.386,- atau 86,90% dari pagu anggaran belanja langsung T.A. 2020.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2020 cukup optimal berdasarkan persentase capaian kinerja 5 indikator kinerja sasaran yang semuanya berada pada kategori baik (>90%) dan juga progres capaian kinerja hingga tahun sebelumnya dari 4 indikator sasaran yang belum dapat diperoleh data



realisasi kinerjanya pada tahun 2020 karena belum diperoleh/dirilis dari instansi terkait hingga saat pelaporan ini. Hal ini didasarkan pada target kinerja 9 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Renstra Tahun 2018-2023. Pemanfaatan anggaran sebagai sumber daya utama untuk pencapaian target kinerja sasaran tersebut juga cukup efisien bila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi penggunaan anggaran belanja dari seluruh program/kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020.

Namun demikian, masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya guna mendorong pencapaian target kinerja akhir dari indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, khususnya terhadap target kinerja 2 (dua) IKU yang belum optimal pencapaiannya, yang terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja seluruh aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun berikutnya.

Permasalahan sekaligus tantangan utama yang perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone adalah :

1. *Masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Nilai Maturitas SPIP, Tingkat Pencegahan KKN, serta Tingkat Pelayanan Publik yang belum optimal sesuai dengan standar ideal yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;*
2. *Masih diperlukan upaya untuk menjaga dan mengembangkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat mempertahankan opini WTP dari BPK-RI dengan kondisi yang lebih bersih dari temuan audit BPK-RI maupun potensi terjadinya KKN;*
3. *Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang belum optimal sesuai dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan;*
4. *Penyelenggaraan pemerintah desa masih perlu dikawal, khususnya yang terkait dengan pengelolaan APBDes yang masih lemah pengendalian internalnya dan seringkali menjadi objek pengaduan masyarakat, serta*
5. *Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar IACM (Internal Audit Capability Model) secara penuh, termasuk didalamnya strategi pelaksanaan pengawasan di tengah kondisi Pandemi Covid-19.*



Kedepannya, tantangan ini akan dihadapi dengan memacu kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang difokuskan pada :

- Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal yang lebih diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Pengelolaan APBDes, beserta Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dilakukan melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan penyedia jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa, serta perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dengan prinsip penganggaran "*Money Follow Program*".
- Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, dan Itprov. Sul-Sel di dalam prosesnya
- Penerapan Kendali Mutu dalam penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone sesuai Pedoman Kendali Mutu Pengawasan yang berlaku bagi APIP.
- Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta penerapan reward dan punishment atas kinerja aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.
- Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP menuju level 3 (*integrated*) secara penuh berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) yang mampu mendorong terciptanya efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang menjadi maksud dan tujuan dari penyusunan LKj ini, maka hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa



permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan dari hasil evaluasi capaian kinerja yang ada, akan menjadi tidak bermakna jika hanya berhenti pada penyajian laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk penerapannya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem pengendalian internal dalam implementasi SAKIP sebagai acuan untuk upaya peningkatan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan pada Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Inspektur Daerah bersama jajaran aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone kepada Bupati dan masyarakat Kab. Bone.



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Cascading RPJMD-Renstra Tahun 2018-2023
Inspektorat Daerah Kab. Bone
- Lampiran 2 : Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023
Inspektorat Daerah Kab. Bone
- Lampiran 3 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kab. Bone
- Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun
2020 Inspektorat Daerah Kab. Bone
- Lampiran 5 : Data Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Tahun 2020 Inspektorat Daerah Kab. Bone
- Lampiran 6 : Data Diklat/Bimtek yang diikuti oleh Pegawai Inspektorat
Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020



LAMPIRAN 1

Cascading

RPJMD-Renstra Tahun 2018-2023

Inspektorat Daerah Kab. Bone



LAMPIRAN 2

Tujuan & Sasaran Renstra Tahun 2018-2023
Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN DAN SASARAN - INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BESERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK/IMPACT)	SATUAN	BASELINE DATA 2017	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TARGET KINERJA (DAMPAK)					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	C (41,12)	CC (50,50)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang berfokus pada : - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Daerah - Peningkatan Maturitas SPIP - Peningkatan Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi - Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Resiko berdasarkan prinsip 3 E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis + Kesetaraan) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. 2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, maturitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan KKN.
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <small>(masih ada temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</small>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <small>(masih ada temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</small>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)		
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks	C (>30 – 50)	C (>30 – 50)	CC (>50 – 60)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	2. Membangun sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.	3. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Itpro dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
		4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 1 (Rintisan)	Level 1 (Rintisan)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)		
		5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen	80	80	85	90	95	98	99	99		
3.	Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85	85	90	95	95	100	100	100	Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik	Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
		6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85	85	90	95	95	100	100	100		
4.	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen	40	45	50	60	70	80	90	90	Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan internal, baik dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri, maupun Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 2 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 2 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hub. Organisasi - Peran, Layanan & Praktek Profesional - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assessment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.



LAMPIRAN 3

**Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kab. Bone**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Andi Islamuddin**

Jabatan : **Inspektur Daerah**

selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si.**

Jabatan : **Bupati Bone**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2020



PIHAK KEDUA,

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19701020 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (>60 – 70)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	90 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	60 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 3.333.805.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 1.405.540.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 55.400.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp. 78.713.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 12.856.750,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 26.250.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 873.610.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 985.850.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 : Rp. 6.772.025.250,-

Watampone, 2 Januari 2020



BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.



INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19701020 199603 1 004

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (>60 – 70)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	90 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	60 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.359.450.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 310.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 31.575.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp. 22.712.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 3.661.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 0,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 651.998.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 927.932.450,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2020 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 (SETELAH REALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 BESERTA DAMPAKNYA): Rp. 4.307.329.450,-

Watampone, 22 April 2020



BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si



INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19701020 199603 1 004



LAMPIRAN 4

Pengukuran Kinerja
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kab. Bone



**PENGUKURAN RENCANA AKSI PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2020**

TUJUAN :															
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah															
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)															
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel															
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM & ANGGARAN	INDIKATOR PROGRAM	KRITERIA KEBERHASILAN PROGRAM (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		KEGIATAN & ANGGARAN	INDIKATOR KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI KINERJA	%				REALISASI KINERJA	%				REALISASI KINERJA	%	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8	9	10 = 9/8	11	12	13	14	15 = 14/13	16
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019)	Target Tahunan : B (>60-70)	Belum Ada Hasil Evaluasi	-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pagu : Rp. 2.964.333.500,-	> Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Target Tahunan : 65%	53,03%	81,58%	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pagu : Rp. 2.479.208.500,- Realisasi : Rp. 2.154.354.200,- (87%)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Target Tahunan : 4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) : B (>60-70)	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : 65%	53,03%	81,58%			TW 3 (B09) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 4 (B12) : -	Belum Ada Hasil Evaluasi	-			TW 4 (B12) : -	-	-			TW 4 (B12) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2019)	Target Tahunan : WTP	WTP	100%	Realisasi : Rp. 2.544.517.127,- (86%)	> Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK RI	Target Tahunan : 95%	46,97%	49,44%	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Pagu : Rp. 3.600.000,- Realisasi : Rp. 3.600.000,- (100%)	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Target Tahunan : 4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 2 (B06) : WTP	WTP	100%			TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 4 (B12) : -	-	-			TW 4 (B12) : 95%	46,97%	49,44%			TW 4 (B12) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (Hasil Penilaian oleh Kemendagri ditargetkan diperoleh di Triwulan 3 atau 4)	Target Tahunan : CC (>50-60)	Belum Ada Hasil Penilaian	-		> Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Target Tahunan : >50-60	24,08	48,16%	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pagu : Rp. 61.050.000,- Realisasi : Rp. 45.850.000,- (75%)	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Target Tahunan : 4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 3 (B09) : CC (>50-60)	-	-			TW 3 (B09) : >50-60	24,08	48,16%			TW 3 (B09) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 4 (B12) : -	Belum Ada Hasil Penilaian	-			TW 4 (B12) : -	-	-			TW 4 (B12) : 1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Hasil Penilaian oleh BPKP ditargetkan diperoleh di Triwulan 3 atau 4)	Target Tahunan : Level 2 (Berkembang)	Level 1 (Rintisan)	50%		> Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	Target Tahunan : 60%	5,13%	8,55%	Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan Pagu : Rp. 37.500.000,- Realisasi : Rp. 0,- (0%)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Target Tahunan : 2 Laporan Semesteran	0	0%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-	
		TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : 1 Laporan Semesteran	0	0	
		TW 3 (B09) : Level 2 (Berkembang)	-	-			TW 3 (B09) : 60%	-	-			TW 3 (B09) : -	-	-	
		TW 4 (B12) : -	Level 1 (Rintisan)	50%			TW 4 (B12) : -	5,13%	8,55%			TW 4 (B12) : 1 Laporan Semesteran	0	0%	
	5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) (Persentase akhir diperoleh di Triwulan 4 dari hasil olah data satu tahun)	Target Tahunan : 90%	99,77%	111%		> Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : - BPK-RI - APIP (BPKP, ItProv, ItKab) > Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	Target Tahunan : -85%	-81,00%	-95,29%			Target Tahunan : -85%	-81,35%	-95,71%	
		TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-	
		TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-	
		TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : -	-	-	
		TW 4 (B12) : 90%	99,77% (437 OPD+PemDes)	111%			TW 4 (B12) : -85%	-81,00%	-95,29%			TW 4 (B12) : -85%	-81,35%	-95,71%	
							Target Tahunan : 400	437	109%			Target Tahunan : 400	437	109%	
							TW 1 (B03) : -	-	-			TW 1 (B03) : -	-	-	
							TW 2 (B06) : -	-	-			TW 2 (B06) : -	-	-	
							TW 3 (B09) : -	-	-			TW 3 (B09) : -	-	-	
							TW 4 (B12) : 400	437	109%			TW 4 (B12) : 400	437	109%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)		CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM & ANGGARAN	INDIKATOR PROGRAM	KRITERIA KEBERHASILAN PROGRAM (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM		KEGIATAN & ANGGARAN	INDIKATOR KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)		CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				REALISASI KINERJA	%					REALISASI KINERJA	%					REALISASI KINERJA	%	
1	2	3		4	5 = 4/3	6	7	8		9	10 = 9/8	11	12	13		14	15 = 14/13	16
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	95%	100%	105%	> Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		Target Tahunan :	95%	100%	105%	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pagu : Rp. 251.725.000,- Realisasi : Rp. 212.362.927,- (84%)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Target Tahunan :	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	25%	100%	400%			TW 1 (B03) :	25%	100%	400%			TW 1 (B03) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 2 (B06) :	50%	67%	133%			TW 2 (B06) :	50%	66,67%	133%			TW 2 (B06) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 3 (B09) :	75%	75%	100%			TW 3 (B09) :	75%	75%	100%			TW 3 (B09) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	95%	91,67%	96,49%	> Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		Target Tahunan :	95%	91,67%	96,49%	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya Pagu : Rp. 131.250.000,- Realisasi : Rp. 128.350.000,- (98%)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Target Tahunan :	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	> Sekretaris (Program) > Inspektur Pembantu Wilayah (Program) > Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	25%	100%	400%			TW 1 (B03) :	25%	100%	400%			TW 1 (B03) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 2 (B06) :	50%	100%	200%			TW 2 (B06) :	50%	100%	200%			TW 2 (B06) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
		TW 3 (B09) :	75%	86%	114%			TW 3 (B09) :	75%	85,71%	114%			TW 3 (B09) :	1 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	100%	
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APiP (Diakumulasi Setiap Triwulannya) (Jumlah Kebutuhan 88 Orang)	Target Tahunan :	60%	58% (51 Org = 30 L + 21 P)	96,67%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pagu : Rp. 335.020.000,- Realisasi : Rp. 321.695.059,- (96%)	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Target Tahunan :	60%	58% (51 Org = 30 L + 21 P)	96,67%	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pagu : Rp. 310.000.000,- Realisasi : Rp. 301.975.059,- (97%)	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Target Tahunan :	10 Kegiatan	11 Kegiatan	110%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	45%	52% (46 Orang)	116%			TW 1 (B03) :	45%	52% (46 Orang)	116%			TW 1 (B03) :	5 Kegiatan	7 Kegiatan	140%	
		TW 2 (B06) :	50%	52% (46 Orang)	104%			TW 2 (B06) :	50%	52% (46 Orang)	104%			TW 2 (B06) :	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
		TW 3 (B09) :	55%	52% (46 Orang)	94,55%			TW 3 (B09) :	55%	52% (46 Orang)	94,55%			TW 3 (B09) :	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) (Berdasarkan Laporan Hasil QA oleh BPKP)	Target Tahunan :	Level 3 Dengan Perbaikan	Belum Ada Hasil Assessment	-	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Pagu : Rp. 30.900.000,- Realisasi : Rp. 14.920.000,- (48%)	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	83% (5 dari 6 elemen)	67% (4 dari 6)	80,72%	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Pagu : Rp. 30.900.000,- Realisasi : Rp. 14.920.000,- (48%)	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Target Tahunan :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	-	-	-			TW 1 (B03) :	50% (3 dari 6 elemen)	67% (4 dari 6)	134%			TW 1 (B03) :	1 Kegiatan	-	0%	
		TW 2 (B06) :	-	-	-			TW 2 (B06) :	67% (4 dari 6 elemen)	67% (4 dari 6)	100%			TW 2 (B06) :	1 Kegiatan	-	0%	
		TW 3 (B09) :	-	-	-			TW 3 (B09) :	67% (4 dari 6 elemen)	67% (4 dari 6)	100%			TW 3 (B09) :	1 Kegiatan	-	0%	
		Target Tahunan :	Level 3 Dengan Perbaikan	Belum Ada Hasil Assessment	-	Program Penunjang Pemerintahan Umum Pagu : Rp. 32.712.500,- Realisasi : Rp. 29.751.250,- (91%)	Cakupan Realisasi Kegiatan Rencana Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	100%	100%	100%	Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Pagu : Rp. 16.712.500,- Realisasi : Rp. 13.751.250,- (82%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Target Tahunan :	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	-	-	-			TW 1 (B03) :	40%	21%	53%			TW 1 (B03) :	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		TW 2 (B06) :	-	-	-			TW 2 (B06) :	50%	42%	84%			TW 2 (B06) :	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		TW 3 (B09) :	-	-	-			TW 3 (B09) :	75%	71%	95%			TW 3 (B09) :	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	
		Target Tahunan :	Level 3 Dengan Perbaikan	Belum Ada Hasil Assessment	-	Program Penunjang Pemerintahan Umum Pagu : Rp. 32.712.500,- Realisasi : Rp. 29.751.250,- (91%)	Cakupan Realisasi Kegiatan Rencana Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	100%	100%	100%	Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Pagu : Rp. 16.000.000,- Realisasi : Rp. 16.000.000,- (100%)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Target Tahunan :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	-	-	-			TW 1 (B03) :	40%	21%	53%			TW 1 (B03) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
		TW 2 (B06) :	-	-	-			TW 2 (B06) :	50%	42%	84%			TW 2 (B06) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
		TW 3 (B09) :	-	-	-			TW 3 (B09) :	75%	71%	95%			TW 3 (B09) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
		Target Tahunan :	Level 3 Dengan Perbaikan	Belum Ada Hasil Assessment	-	Program Penunjang Pemerintahan Umum Pagu : Rp. 32.712.500,- Realisasi : Rp. 29.751.250,- (91%)	Cakupan Realisasi Kegiatan Rencana Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Diakumulasi Setiap Triwulannya)	Target Tahunan :	100%	100%	100%	Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah Pagu : Rp. 16.000.000,- Realisasi : Rp. 16.000.000,- (100%)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Target Tahunan :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
		TW 1 (B03) :	-	-	-			TW 1 (B03) :	40%	21%	53%			TW 1 (B03) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
		TW 2 (B06) :	-	-	-			TW 2 (B06) :	50%	42%	84%			TW 2 (B06) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
		TW 3 (B09) :	-	-	-			TW 3 (B09) :	75%	71%	95%			TW 3 (B09) :	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM & ANGGARAN	INDIKATOR PROGRAM	KRITERIA KEBERHASILAN PROGRAM (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM		KEGIATAN & ANGGARAN	INDIKATOR KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)		CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI KINERJA	%					REALISASI KINERJA	%					REALISASI KINERJA	%	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8		9	10 = 9/8	11	12	13		14	15 = 14/13	16
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Target : 100% Tahunan : (32 Dokumen) TW 1 (B03) : 65% TW 2 (B06) : 75% TW 3 (B09) : 85% TW 4 (B12) : 100%		100% 28% 53% 75% 100%	100% 43% 71% 88% 100%	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pagu : Rp. 1.361.000,- Realisasi : Rp. 309.400,- (23%)	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Target : 7 Dokumen Tahunan : 2 Dokumen TW 1 (B03) : 2 Dokumen TW 2 (B06) : 1 Dokumen TW 3 (B09) : 1 Dokumen TW 4 (B12) : 3 Dokumen		7 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	100% 100% 200% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
					Pagu : Rp. 3.361.500,- Realisasi : Rp. 635.250,- (17%)	(Diakumulasi Setiap Triwulannya)					Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pagu : Rp. 2.300.500,- Realisasi : Rp. 325.850,- (14%)	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Target : 25 Dokumen Tahunan : 7 Dokumen TW 2 (B06) : 6 Dokumen TW 3 (B09) : 6 Dokumen TW 4 (B12) : 6 Dokumen		25 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	100% 100% 100% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kegiatan)
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Target : 100% Tahunan : 25% TW 1 (B03) : 25% TW 2 (B06) : 25% TW 3 (B09) : 25% TW 4 (B12) : 25%		97% 23% 9% 12% 53%	97% 92% 36% 48% 212%	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pagu : Rp. 154.500.000,- Realisasi : Rp. 154.500.000,- (100%)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Target : 25 Unit/Set (5 Jenis) Tahunan : 1 PC Desktop, 5 Notebook, 16 Printer TW 1 (B03) : 1 PC Desktop, 5 Notebook, 16 Printer TW 2 (B06) : - TW 3 (B09) : - TW 4 (B12) : 2 Tabung Pemadam, 1 Set Proyektor		25 Unit/Set (5 Jenis) 1 PC Desktop, 5 Notebook, 16 Printer - - 2 Tabung Pemadam, 1 Set Proyektor	100% 100% - - 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
					Pagu : Rp. 746.498.000,- Realisasi : Rp. 689.471.379,- (92%)						Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pagu : Rp. 38.000.000,- Realisasi : Rp. 38.000.000,- (100%)	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Target : 4 Unit (3 Jenis) Tahunan : - TW 2 (B06) : - TW 3 (B09) : - TW 4 (B12) : 2 AC, 1 Smart Tv, 1 Podium		4 Unit (3 Jenis) - - - 2 AC, 1 Smart Tv, 1 Podium	100% - - - 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
											Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pagu : Rp. 30.000.000,- Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100%)	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan	Target : 15 Buah (2 Jenis) Tahunan : - TW 2 (B06) : - TW 3 (B09) : - TW 4 (B12) : 12 Meja Rapat, 3 Kursi Rapat		15 Buah (2 Jenis) - - - 12 Meja Rapat, 3 Kursi Rapat	100% - - - 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KRITERIA KEBERHASILAN SASARAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM & ANGGARAN	INDIKATOR PROGRAM	KRITERIA KEBERHASILAN PROGRAM (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		KEGIATAN & ANGGARAN	INDIKATOR KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN (TARGET TAHUNAN & TRIWULAN)	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI KINERJA	%				REALISASI KINERJA	%				REALISASI KINERJA	%	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8	9	10 = 9/8	11	12	13	14	15 = 14/13	16
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Target Tahunan : 5 Paket TW 1 (B03) : 2 Paket TW 2 (B06) : 1 Paket TW 3 (B09) : 1 Paket TW 4 (B12) : 1 Paket	5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket	100% 50% 100% 100% 200%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
										Pagu : Rp. 356.448.000,- Realisasi : Rp. 345.515.320,- (97%)					
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Target Tahunan : 4 Paket TW 1 (B03) : 1 Paket TW 2 (B06) : 1 Paket TW 3 (B09) : 1 Paket TW 4 (B12) : 1 Paket	4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	100% 100% 100% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
										Pagu : Rp. 146.350.000,- Realisasi : Rp. 100.371.059,- (69%)					
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Target Tahunan : 20 Paket TW 1 (B03) : 5 Paket TW 2 (B06) : 5 Paket TW 3 (B09) : 5 Paket TW 4 (B12) : 5 Paket	15 Paket 5 Paket 0 Paket 5 Paket 5 Paket	75% 100% 0% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
										Pagu : Rp. 7.800.000,- Realisasi : Rp. 7.795.000,- (99,93%)	Catatan : Anggaran merupakan persediaan biaya pemeliharaan baik yang terjadwal maupun insidental sesuai kondisi perlengkapan kantor				
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Target Tahunan : 12 Paket TW 1 (B03) : 3 Paket TW 2 (B06) : 3 Paket TW 3 (B09) : 3 Paket TW 4 (B12) : 3 Paket	12 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket	100% 100% 100% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
										Pagu : Rp. 11.000.000,- Realisasi : Rp. 10.890.000,- (99%)	Catatan : Anggaran merupakan persediaan biaya pemeliharaan baik yang terjadwal maupun insidental sesuai kondisi peralatan kantor				
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeler Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Target Tahunan : 12 Paket TW 1 (B03) : 3 Paket TW 2 (B06) : 3 Paket TW 3 (B09) : 3 Paket TW 4 (B12) : 3 Paket	12 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket	100% 100% 100% 100% 100%	> Sekretaris (Program) > Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Kegiatan)
										Pagu : Rp. 2.400.000,- Realisasi : Rp. 2.400.000,- (100%)	Catatan : Anggaran merupakan persediaan biaya pemeliharaan baik yang terjadwal maupun insidental sesuai kondisi meubeler kantor				



LAMPIRAN 5

Data Realisasi Pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kab. Bone



DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2020 INSPEKTORAT KAB. BONE
(AUDIT DAN PEMERIKSAAN KHUSUS PADA SKPD, SEKOLAH, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN)

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
Audit				
1	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Bontocani Kab. Bone	700/704/50/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/28/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Cina Kab. Bone	700/704/50/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/29/III/ITDA 2 Maret 2020
2	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Kahu Kab. Bone.	700/704/51/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/30/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Tonra Kab. Bone.	700/704/51/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/31/III/ITDA 2 Maret 2020
3	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Kajuara Kab. Bone.	700/704/52/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/32/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Mare Kab. Bone.	700/704/52/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/33/III/ITDA 2 Maret 2020
4	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Tellu LimpoE Kab. Bone.	700/704/53/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/34/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Ulaweng Kab. Bone.	700/704/53/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/35/III/ITDA 2 Maret 2020
5	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Amali Kab. Bone.	700/704/54/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/36/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Bengo Kab. Bone.	700/704/54/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/37/III/ITDA 2 Maret 2020
6	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Lappariaja Kab. Bone.	700/704/55/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/38/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Lamuru Kab. Bone.	700/704/55/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/39/III/ITDA 2 Maret 2020
7	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Barebbo Kab. Bone.	700/704/56/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/40/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan SibuluE Kab. Bone.	700/704/56/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/41/III/ITDA 2 Maret 2020
8	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Libureng Kab. Bone.	700/704/57/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/42/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Patimpeng Kab. Bone.	700/704/57/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/43/III/ITDA 2 Maret 2020
9	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Salomekko Kab. Bone.	700/704/58/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/44/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Ponre Kab. Bone.	700/704/58/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/45/III/ITDA 2 Maret 2020
10	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Awangpone Kab. Bone.	700/704/59/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/46/III/ITDA 2 Maret 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Ajangale Kab. Bone.	700/704/59/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/47/III/ITDA 2 Maret 2020
11	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Palakka Kab. Bone.	700/704/60/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/48/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Dua BoccoE Kab. Bone.	700/704/60/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/49/III/ITDA 2 Maret 2020
12	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Tellu SiattingE Kab. Bone.	700/704/61/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/50/III/ITDA 2 Maret 2020
	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada kantor Kecamatan dan Kelurahan T.A. 2019 pada Kecamatan Kecamatan Cenrana Kab. Bone.	700/704/61/I/2020 29 Januari 2020	03 s.d. 14 Februari 2020	793.04/51/III/ITDA 2 Maret 2020
13	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Bontocani Kab. Bone pada Desa : a. Desa Watangcani b. Desa Mattirowalie c. Desa Pattuku d. Desa Bana e. Desa Erecinnong	700/704/127/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	 793.04/71/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/72/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/73/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/74/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/75/IV/ITDA 3 April 2020
14	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Kahu Kab. Bone pada Desa : a. Desa Sanrego b. Desa Magenrang c. Desa Camillo d. Desa Biru e. Desa Bonto Padang	700/704/128/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	 793.04/76/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/77/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/78/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/79/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/80/IV/ITDA 3 April 2020
15	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Kajuara Kab. Bone pada Desa : a. Desa Abbumpungeng b. Desa Raja c. Desa Lemo d. Desa Polewali e. Desa Ancu	700/704/129/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	 793.04/81/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/82/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/83/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/84/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/85/IV/ITDA 3 April 2020
16	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Lamuru Kab. Bone pada Desa : a. Desa Mamminasae b. Desa Padaelo c. Desa Seberang	700/704/130/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	 793.04/86/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/87/IV/ITDA 3 April 2020 793.04/88/IV/ITDA 3 April 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	d. Desa Poleonro	700/704/1720/III/2020 20 Maret 2020	23 s.d. 27 Maret 2020	793.04/89/IV/ITDA 3 April 2020
	e. Desa Barakkac			793.04/90/IV/ITDA 3 April 2020
17	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Amali Kab. Bone pada Desa : a. Desa Lili Riattang b. Desa Wellulang c. Desa Tassipi d. Desa Ulaweng Riaja e. Desa Bila	700/704/131/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/91/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/92/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/93/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/94/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/95/IV/ITDA 3 April 2020
18	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Libureng Kab. Bone pada Desa : a. Desa Mattiro Walie b. Desa Bune c. Desa Baringeng d. Desa Tappale e. Desa Tompo Bulu	700/704/132/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/96/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/97/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/98/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/99/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/100/IV/ITDA 3 April 2020
19	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Patimpeng Kab. Bone pada Desa : a. Desa Bulu Ulaweng b. Desa Patimpeng c. Desa Pationgi d. Desa Masago e. Desa Latellang	700/704/133/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/101/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/102/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/103/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/104/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/105/IV/ITDA 3 April 2020
20	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Salomekko Kab. Bone pada Desa : a. Desa Ulubalang b. Desa Bellu c. Desa Gattareng d. Desa Tebba e. Desa Mallemongeng	700/704/134/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/106/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/107/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/108/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/109/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/110/IV/ITDA 3 April 2020
21	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2019 di Kec. Ajangale Kab. Bone pada Desa : a. Desa Pacciro b. Desa Telle c. Desa Pinceng Pute d. Desa Manciri	700/704/135/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/111/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/112/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/113/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/114/IV/ITDA 3 April 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	e. Desa Timurung			793.04/115/IV/ITDA 3 April 2020
22	Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa TA. 2019 di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone pada Desa : a. Desa Pattiro b. Desa Praja Maju c. Desa Padacengnga d. Desa Solo e. Desa Tawaroe	700/704/136/II/2020 28 Februari 2020	04 s.d. 17 Maret 2020	
				793.04/116/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/117/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/118/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/119/IV/ITDA 3 April 2020
				793.04/120/IV/ITDA 3 April 2020
23	Melakukan Audit Kinerja atas program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone.	700/704/287/VI/2020 30 Juni 2020	06 s.d. 17 Juli 2020	793.04/213/AK/VII/ITDA 16 Juli 2020
24	Melakukan Audit Kinerja atas program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone.	700/704/288/VI/2020 30 Juni 2020	06 s.d. 17 Juli 2020	793.04/214/AK/VII/ITDA 16 Juli 2020
25	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada Kantor Camat Tanete Riattang dan Kelurahan T.A. 2019. a. Kelurahan Masumpu b. Kelurahan Walanae c. Kelurahan Biru d. Kelurahan Pappolo e. Kelurahan Ta f. Kelurahan Bukaka g. Kelurahan Manurunge h. Kelurahan Watampone	700/704/318/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/223/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/224/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/225/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/226/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/227/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/228/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/229/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/230/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/231/KEL/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
26	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada Kantor Camat Tanete Riattang Barat dan Kelurahan T.A. 2019. a. Kelurahan Macege b. Kelurahan Macanang c. Kelurahan Jeppe'E d. Kelurahan Watang Palakka e. Kelurahan Bulu Tempe f. Kelurahan Majang g. Kelurahan Mattirowalie h. Kelurahan Polewali	700/704/319/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/232/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/233/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/234/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/235/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/236/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/237/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/238/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/239/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/240/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
27	Melakukan Audit Ketaatan/Operasional pada Kantor Camat Tanete Riattang Timur dan Kelurahan T.A. 2019. a. Kelurahan Tibojong b. Kelurahan Cellu	700/704/320/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/241/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/242/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
				793.04/243/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	c. Kelurahan Bajoe			793.04/244/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
	d. Kelurahan Lonrae			793.04/245/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
	e. Kelurahan Toro			793.04/246/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
	f. Kelurahan Palette			793.04/247/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
	g. Kelurahan Panyula			793.04/248/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
	h. Kelurahan Waetuo			793.04/249/Kel/VIII/ITDA 28 Agustus 2020
28	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Cina Kab. Bone pada : a. Desa Abbumpungeng b. Desa Cinennung c. Desa Kawerang d. Desa Padang Loang e. Desa Arasoe	700/704/412/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	 793.04/326/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/327/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/328/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/329/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/330/XI/ITDA 12 Nopember 2020
29	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Mare Kab. Bone pada : a. Desa Lappa Upang b. Desa Batu Gading c. Desa Ujung Salangketo d. Desa Pattiro e. Desa Mattiro Walie	700/704/413/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	 793.04/331/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/332/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/333/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/334/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/335/XI/ITDA 12 Nopember 2020
30	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Tonra Kab. Bone pada : a. Desa Libureng b. Desa Bone Pute c. Desa Bulu-bulu d. Desa Ujunge e. Desa Rappa	700/704/414/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	 793.04/336/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/337/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/338/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/339/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/340/XI/ITDA 12 Nopember 2020
31	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Bengo Kab. Bone pada : a. Desa Mattirowalie b. Desa Liliriawang c. Desa Samaenre d. Desa Bengo e. Desa Walimpong	700/704/415/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	 793.04/341/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/342/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/343/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/344/XI/ITDA 12 Nopember 2020 793.04/345/XI/ITDA 12 Nopember 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
32	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Lappariaja Kab. Bone pada : a. Desa Pattuku LimpoE b. Desa Mattampawalie c. Desa Tenri Pakkua d. Desa Patangkai e. Desa Lili Riattang	700/704/416/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/346/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/347/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/348/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/349/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/350/XI/ITDA 12 Nopember 2020
33	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Ulaweng Kab. Bone pada : a. Desa Tadang PaliE b. Desa JompiE c. Desa Manurunge d. Desa Tea Musu e. Desa Lamakkaraseng	700/704/417/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/351/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/352/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/353/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/354/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/355/XI/ITDA 12 Nopember 2020
34	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. SibuluE Kab. Bone pada : a. Desa Cinnong b. Desa Kalibong c. Desa Balieng Toa d. Desa Masenreng Pulu e. Desa Letta Tanah	700/704/418/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/356/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/357/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/358/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/359/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/360/XI/ITDA 12 Nopember 2020
35	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Barebbo Kab. Bone pada : a. Desa Watu b. Desa Kading c. Desa Barebbo d. Desa Corawali e. Desa Congko	700/704/419/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/361/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/362/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/363/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/364/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/365/XI/ITDA 12 Nopember 2020
36	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Ponre Kab. Bone pada : a. Desa Mappesangka b. Desa Salampe c. Desa Pattimpa d. Desa Poleonro e. Desa Tellu BoccoE	700/704/420/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/366/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/367/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/368/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/369/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/370/XI/ITDA 12 Nopember 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
37	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone pada : a. Desa Tajong b. Desa Itterung c. Desa Palongki d. Desa Ulo e. Desa Patangnga	700/704/421/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/371/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/372/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/373/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/374/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/375/XI/ITDA 12 Nopember 2020
38	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Palakka Kab. Bone pada : a. Desa Siame b. Desa Usa c. Desa Passippo d. Desa Ureng e. Desa Tanah Tengnga	700/704/422/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/376/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/377/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/378/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/379/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/380/XI/ITDA 12 Nopember 2020
39	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Awangpone Kab. Bone pada : a. Desa Cakke Bone b. Desa Mappalo Ulaweng c. Desa Cumpiga d. Desa Awolagading e. Desa Matuju	700/704/423/X/2020 01 Oktober 2020	07 s.d. 20 Oktober 2020	
				793.04/381/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/382/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/383/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/384/XI/ITDA 12 Nopember 2020
				793.04/385/XI/ITDA 12 Nopember 2020
40	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2019 Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Awangpone Kab. Bone.	700/704/456/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 18 November 2020	793.04/395/DBSD/XI/ITDA 25 Nopember 2020
41	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2019 Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kec. Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Timur, Kec. Tanete Riattang Barat, Kec. Mare, & Kec. Palakka Kab. Bone.	700/704/457/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 18 November 2020	793.04/396/DBSMP/XI/ITDA 25 Nopember 2020
42	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Cenrana Kab. Bone pada : a. Desa Pallae b. Desa Labotto c. Desa Panyiwu d. Desa Ajallasse e. Desa Pallime	700/704/458/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 18 November 2020	
				793.04/390/XI/ITDA 25 Nopember 2020
				793.04/391/XI/ITDA 25 Nopember 2020
				793.04/392/XI/ITDA 25 Nopember 2020
				793.04/393/XI/ITDA 25 Nopember 2020
				793.04/394/XI/ITDA 25 Nopember 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
43	Melakukan Audit Kepatuhan/Operasioanl pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2019	700/704/471/XI/2020 11 November 2020	16 s.d. 27 November 2020	793.04/424/XII/ITDA 10 Desember 2020
44	Melakukan Audit Kepatuhan/Operasioanl pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Bone Tahun Anggaran 2019	700/704/477/XI/2020 18 November 2020	16 s.d. 27 November 2020	793.04/425/XII/ITDA 14 Desember 2020
45	Melakukan Audit Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APDesa T.A. 2019 Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone pada : a. Desa Lagori b. Desa Gaya Baru c. Desa Tellang Kere d. Desa Pallawa e. Desa Tondong	700/704/486/XI/2020 20 November 2020	25 November s.d. 08 Desember 2020	 793.04/446/XII/ITDA 30 Desember 2020 793.04/447/XII/ITDA 30 Desember 2020 793.04/448/XII/ITDA 30 Desember 2020 793.04/449/XII/ITDA 30 Desember 2020 793.04/450/XII/ITDA 30 Desember 2020
46	Melakukan Audit Kepatuhan/Operasioanl pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Bencana Kab. Bone Tahun Anggaran 2019	700/704/502/XII/2020 03 Desember 2020	07 s.d. 21 Desember 2020	793.04/441/XII/ITDA 29 Desember 2020
47	Melakukan Audit Kepatuhan/Operasioanl pada Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun Anggaran 2019	700/704/508/XII/2020 08 Desember 2020	10 s.d. 23 Desember 2020	793.04/442/XII/ITDA 29 Desember 2020
Pemeriksaan (Audit) Khusus				
1	Melakukan Pemeriksaan khusus atas Bantuan Sosial Swadaya Masyarakat Kab. Bone T.A. 2017 dan T.A. 2018 di Dinas Perumahan, Kawasan	700/704/90/II/2020 11 Februari 2020	17 s.d. 21 Februari 2020	781.04/07/III/ITDA 16 Maret 2020
	Melakukan Lanjutan II Pemeriksaan khusus atas Bantuan Sosial Swadaya Masyarakat Kab. Bone T.A. 2017 dan T.A. 2018 di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone.	700/704/112/II/2020 21 Februari 2020	24 s.d. 28 Februari 2019	781.04/07/III/ITDA 16 Maret 2020
	Melakukan Lanjutan II Pemeriksaan khusus atas Bantuan Sosial Swadaya Masyarakat Kab. Bone	700/704/125/II/2020 28 Februari 2020	02 s.d. 13 Maret 2019	781.04/07/III/ITDA 16 Maret 2020
2	Melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa di Desa Tondong Kec.	700/704/91/II/2020 11 Februari 2020	17 s.d. 21 Februari 2020	781.04/08/III/ITDA 16 Maret 2020
	Melakukan Lanjutan II Perhitungan Kerugian Negara pada Penggunaan Dana Desa di Desa Tondong Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone T.A. 2017 dan 2018.	700/704/113/II/2020 21 Februari 2020	24 s.d. 28 Februari 2019	781.04/08/III/ITDA 16 Maret 2020
3	Melakukan Audit Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)	700/704/209/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/138/AK/V/ITDA 13 Mei 2020
4	Melakukan Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone	700/704/210/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/137/AK/V/ITDA 13 Mei 2020
5	Melakukan Audit Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone	700/704/211/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/139/AK/V/ITDA 26 Mei 2020
6	Melakukan Pemeriksaan Khusus Kegiatan Perjalanan Dinas dan Makan Minum pada Sekretariat Daerah Kab. Bone TA. 2019	700/704/212/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/140/PK/VI/ITDA 3 Juni 2020
7	Melakukan Pemeriksaan Khusus Kegiatan Perjalanan Dinas dan Makan Minum pada Dinas Pendidikan Kab. Bone TA. 2019	700/704/213/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/141/PK/VI/ITDA 3 Juni 2020
8	Melakukan Pemeriksaan Khusus Kegiatan Perjalanan Dinas dan Makan Minum pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone TA. 2019	700/704/214/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/142/PK/VI/ITDA 3 Juni 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
9	Melakukan Pemeriksaan Khusus Administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Januari s.d. Mei 2020 sehubungan dengan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Seberang Kec. Lamuru an. K.M. Jumandar, S.Ag., M.Pd.I	700/704/250/VI/2020 02 Juni 2020	04 s.d. 10 Juni 2020	781.04/13/VI/ITDA 11 Juni 2020
10	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan APBDesa (Dana Desa, Bagu Hasil Pajak dan Retribusi, ADD) T.A. 2020 di Desa Bontojai Kec. Bontocani Kab. Bone.	700/704/268/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/15/VII/ITDA 6 Juli 2020
11	Melakukan Audit Khusus terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton (Dana Desa) T.A. 2018 di Desa Cinennung Kec. Cina Kab. Bone	700/704/269/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/16/VII/ITDA 6 Juli 2020
12	Melakukan Audit Khusus terhadap Pekerjaan Jalan Tani Dusun Maralleng (Dana Desa) T.A. 2018 di Desa Kawerang Kec. Cina Kab. Bone	700/704/270/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/17/VII/ITDA 6 Juli 2020
13	Melakukan Audit Khusus terhadap Pekerjaan Talud, Timbunan dan Plat Ducker (Dana Desa) T.A. 2017 di Desa Ulo Kec. Tellu SiattingE Kab. Bone	700/704/273/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/18/VII/ITDA 6 Juli 2020
14	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap pembangunan Rabat beton dan Talud Desa Sengeng PaliE Kec. Lappariaja Kab. Bone T.A. 2019	700/704/274/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/19/VII/ITDA 6 Juli 2020
15	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap pembangunan Jalan setapak (Paving Blok) Dusun II Desa Lampoko Kec. Barebbo Kab. Bone Tahun 2019	700/704/275/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/20/VII/ITDA 6 Juli 2020
16	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap Pengelolaan APBDesa (Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retibusi, ADD) T.A. 2017 dan 2018 di Desa Salampe Kec. Ponre Kab. Bone	700/704/276/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/21/VII/ITDA 6 Juli 2020
17	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap Pengelolaan APBDesa (Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retibusi, ADD) T.A. 2017 dan 2018 di Desa Salampe Kec. Ponre Kab. Bone	700/704/276/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/21/VII/ITDA 6 Juli 2020
18	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap Pengelolaan Anggaran Program DAK (Dana Alokasi khusus) tentang pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Limbah di Kec. Tanete Riattang dan Kec. Tanete Riattang Timur T.A. 2018 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone	700/704/277/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/22/VII/ITDA 6 Juli 2020
19	Melakukan Audit Khusus Investigasi terhadap Pengelolaan APBDesa (Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retibusi, ADD) T.A. 2017, 2018 dan 2019 di Desa Pinceng Pute Kec. Ajangale Kab. Bone	700/704/278/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/23/VII/ITDA 6 Juli 2020
20	Melakukan Audit tujuan tertentu terkait dengan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Tahun 2014 di Kelurahan JeppeE Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone	700/704/289/VII/2020 19 Juni 2020	06 s.d. 10 Juli 2020	781.04/26/VII/ITDA 20 Juli 2020
21	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan APBDesa terkait Pembangunan Tanggul di atas sungai dengan menggunakan anggaran negara dan dijadikan hak milik oleh mantan Kepala Desa Kading (Andi Margono) dan Pembangunan Jalan Desa dari arah Tajjuru sampai Limpoe tanpa persetujuan warga dan pemilik lahan di Desa Kading Kec. Awangpone Kab. Bone.	700/704/303/VII/2020 15 Juli 2020	20 s.d. 24 Juli 2020	781.04/29/VII/ITDA 22 Juli 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
22	Melakukan Kegiatan Probit Audit pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone pada Paket 01 Rehabilitasi Daerah Irigasi Raja, Paket 03 Rehabilitasi Daerah Irigasi Toddang Jompi, Paket 04 Rehabilitasi Daerah Irigasi Wessa, Paket 05 Rehabilitasi Daerah Irigasi Wollangi	700/704/321/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/250/PA/VIII/ITDA 24 Agustus 2020
23	Melakukan Kegiatan Probit Audit pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone pada Pembangunan Kantor Camat Salomekko, Pembangunan Kantor Camat Tonra, Pembangunan Kantor Camat Mare, Pembangunan Kantor Camat Ulaweng, Revitalisasi RTH Persibo	700/704/322/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/251/PA/VIII/ITDA 24 Agustus 2020
24	Melakukan Kegiatan Probit Audit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone pada Kegiatan Pengadaan Mesin Combine Padi	700/704/323/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/252/PA/VIII/ITDA 24 Agustus 2020
	Melakukan Kegiatan Probit Audit pada Dinas Kesehatan Kab. Bone pada Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Kading dan Pembangunan IPAL (PKM Ulaweng, PKM, Kahu, PKM Tellu SiattingE, PKM Lamuru, PKM Taretta)			793.04/253/PA/VIII/ITDA 24 Agustus 2020
25	Melakukan Kegiatan Probit Audit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone	700/704/324/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 12 Agustus 2020	793.04/254/PA/VIII/ITDA 24 Agustus 2020
26	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan APBDesa T.A. 2017, 2019, dan 2019 di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone	700/704/341/VIII/2020 12 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/34/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
27	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan keuangan APBDesa T.A. 2020 di Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone	700/704/344/VIII/2020 12 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/35/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
28	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan keuangan APBDesa T.A. 2016 dan 2017 di Desa Tirong Kec. Palakka Kab. Bone	700/704/345/VIII/2020 12 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/36/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
29	Melakukan Audit Khusus terhadap pengelolaan APBDesa T.A. 2016, 2017, 2018, dan 2019 di Desa Abbanguang Kec. Awangpone Kab. Bone	700/704/346/VIII/2020 12 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/37/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
30	Melakukan Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak pada Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persibo di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kab. Bone	700/704/397/IX/2020 21 september 2020	24 s.d. 30 september 2020	793.04/324/PA/X/ITDA 5 oktober 2020
31	Melakukan Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak pada Paket 01 di Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Bone	700/704/398/IX/2020 21 september 2020	24 s.d. 30 september 2020	793.04/325/PA/X/ITDA 5 oktober 2020
32	Melakukan Audit Khusus terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Kab. Bone	700/704/400/IX/2020 21 september 2020	24 s.d. 30 september 2020	781.04/41/X/ITDA 12 oktober 2020
33	Melakukan Audit Tujuan tetentu atas pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan yang bersumber dari APBD terhadap kontrak yang telah dilakukan pembayaran di BLUD RSUD Tenriawaru Kab. Bone	700/704/422/X/2020 23 Oktober 2020	04 s.d. 17 November 2020	781.04/47/XI/ITDA 6 Nopember 2020
34	Melakukan Perhitungan Kerugian Negara atas Belanja Penanganan Covid-19 di Kab. Bone T.A. 2020 pada BPBD Kab. Bone, Dinas Sosial Kab. Bone, Dinas Kesehatan Kab. Bone & Kecamatan se Kab. Bone	700/704/450/X/2020 27 Oktober 2020	02 s.d. 06 November 2020	781.04/47/XI/ITDA 6 Nopember 2020
35	Melakukan Audit Khusus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Padaidi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone T.A. 2018 dan T.A. 2019	700/704/455/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 11 November 2020	781.04/49/XI/ITDA 12 Nopember 2020
36	Melakukan Audit Khusus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Padaidi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone T.A. 2018 dan T.A. 2019	700/704/455/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 11 November 2020	781.04/49/XI/ITDA 12 Nopember 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
37	Melakukan Audit tujuan tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kecamatan Lamuru Kab. Bone T.A. 2019 di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bone	700/704/463/XI/2020 09 November 2020	10 s.d. 16 November 2020	781.04/50/XI/ITDA 19 Nopember 2020
38	Melakukan Audit Information Technology (IT) atas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kab. Bone	700/704/510/XII/2020 08 Desember 2020	14 s.d. 18 Desember 2020	793.04/426/IT/XII/ITDA 21 Desember 2020



**DATA REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2020 INSPEKTORAT KAB. BONE
(REVIU, EVALUASI, MONITORING, DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA)**

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
REVIU				
1	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/89/II/2020 11 Februari 2020	17 s.d. 21 Februari 2019	793.04/63/LKPD/III/ITDA 12 Maret 2020
	Melakukan Lanjutan II Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/111/II/2020 21 Februari 2020	24 s.d. 28 Februari 2019	
	Melakukan Lanjutan III Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/124/II/2020 28 Februari 2020	02 s.d. 13 Maret 2019	
2	Melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2019 di Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Bone	700/704/154/III/2020 11 Maret 2020	13 s.d. 19 Maret 2019	793.04/65/LPPD/III/ITDA 20 Maret 2020
3	Melakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A. 2020 pada : a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone 6 (enam) paket b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bone 1 (satu) paket c. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone 13 (tiga belas) paket	700/704/162/III/2020 16 Maret 2020	16 s.d. 20 Maret 2020	
				793.04/66/HPS/III/ITDA 20 Maret 2020
				793.04/67/HPS/III/ITDA 20 Maret 2020
				793.04/68/HPS/III/ITDA 20 Maret 2020
4	Melakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) T.A. 2020 pada : a. Dinas Kesehatan Kab. Bone 2 (dua) paket b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone 1 (satu) paket c. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan pertanahan Kab. Bone 3 (tiga) paket	700/704/181/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	
				793.04/121/HPS/IV/ITDA 13 April 2020
				793.04/122/HPS/IV/ITDA 13 April 2020
				793.04/123/HPS/IV/ITDA 13 April 2020
5	Melakukan Reviu Atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone, Dinas kesehatan Kab. Bone, BLUD RS Tenriawaru Kab. Bone, RS Datu Pancaitana Kab. Bone.	700/704/182/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	793.04/133/RKRA/IV/ITDA 24 April 2020
	Melakukan Lanjutan Reviu Atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/189/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	
	Melakukan Lanjutan Reviu Atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/204/IV/2020 20 April 2020	21 s.d. 27 April 2020	
6	Melakukan Reviu Atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone, Dinas kesehatan Kab. Bone, BLUD RS Tenriawaru Kab. Bone, RS Datu Pancaitana Kab. Bone.	700/704/183/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	793.04/132/PBJ/IV/ITDA 29 April 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	Melakukan Lanjutan Reviu Atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/188/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	793.04/132/PBJ/IV/ITDA 29 April 2020
	Melakukan Lanjutan Reviu Atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/205/IV/2020 20 April 2020	21 s.d. 27 April 2020	
7	Melakukan Reviu Standarisasi Harga Barang/Bahan/Peralatan dan Jasa Semester I Tahun 2020 dalam Lingkup Pemerintah Kab. Bone di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone.	700/704/184/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	793.04/126/SSH/IV/ITDA 22 April 2020
8	Melakukan Reviu Pedoman Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/190/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	793.04/127/ASB/IV/ITDA 22 April 2020
9	Melakukan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Pemerintah Kab. Bone di Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/191/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	793.04/128/LKIJ/IV/ITDA 21 April 2020
10	Melakukan Reviu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone	700/704/207/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/136/RKPD/V/ITDA 13 Mei 2020
11	Melakukan Reviu Pedoman Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2021 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone	700/704/208/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	793.04/134/ASB/V/ITDA 13 Mei 2020
12	Melakukan Reviu Rancangan KUA & PPAS Kab. Bone Tahun 2021 di BPKAD Kab. Bone	700/704/272/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	793.04/212/KUAPPAS/VII/ITDA 24 Juli 2020
13	Melakukan Reviu terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Rujukan Tahun Anggaran 2020	700/704/304/VII/2020 16 Juli 2020	Disesuaikan kebutuhan reviu	793.04/216/DAK/VII/ITDA 22 Juli 2020
14	Melakukan Reviu RKPD Perubahan T.A. 2020 di Badan Perencanaan Daerah Kab. Bone	700/704/326/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 05 Agustus 2020	793.04/218/RKPD/VIII/ITDA 6 Agustus 2020
15	Melakukan Reviu KUA & PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 di BPKAD Kab. Bone	700/704/339/VIII/2020 12 Agustus 2020	13 s.d. 24 Agustus 2020	793.04/255/KUAPPAS/VIII/ITDA 26 Agustus 2020
16	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Sekretariat Daerah b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d. Dinas Perdagangan e. Dinas Pendidikan f. Kecamatan Tanete Riattang g. Kecamatan Cina h. Kecamatan Tonra i. Kecamatan Bontocani	700/704/360/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/371/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	 793.04/257/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/258RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/259/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/260/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/261/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/262/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/263/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/264/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/265/RKA/IX/ITDA 18 September 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
17	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. Dinas Pemadam Kebakaran d. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana e. Dinas Perpustakaan & Kearsipan f. Kecamatan Mare g. Kecamatan Kajuara h. Kecamatan Kahu	700/704/361/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/372/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	
				793.04/266/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/267/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/268/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/269/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/270/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/271/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/272/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/273/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
18	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah b. Dinas Sosial c. Dinas Perhubungan d. Dinas Kepemudaan & Olahraga e. BLUD RS Tenriawaru f. Kecamatan Tanete Riattang Barat g. Kecamatan Ulaweng h. Kecamatan Bengo i. Kecamatan Tellu LimpoE	700/704/362/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/373/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	
				793.04/274/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/275/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/276/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/277/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/278/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/279/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/280/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/281/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
19	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Dinas Perindustrian b. Dinas Kesehatan c. Dinas Lingkungan Hidup d. Dinas Kelautan & Perikanan e. Dinas Ketahanan Pangan f. Kecamatan Amali	700/704/363/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/374/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	
				793.04/283/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/284/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/285/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/286/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/287/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
				793.04/288/RKA/IX/ITDA 18 September 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	g. Kecamatan Lamuru			793.04/289/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
	h. Kecamatan Lappariaja			793.04/290/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
20	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Sekretariat DPRD b. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil c. Dinas Kebudayaan d. Dinas Ketenagakerjaan e. Kecamatan Tanete Riattang Timur f. Kecamatan Sibulue g. Kecamatan Barebbo h. Kecamatan Ponre	700/704/364/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/375/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	 793.04/291/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/292/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/293/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/294/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/295/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/296/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/297/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/298/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
21	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Badan Pendapatan Daerah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan c. Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air e. Satuan Polisi Pamong Praja f. Kecamatan Libureng g. Kecamatan Patimpeng h. Kecamatan Salomekko	700/704/365/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/376/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	 793.04/299/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/300/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/301/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/302/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/303/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/304/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/305/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/306/RKA/IX/ITDA 18 September 2020
22	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2021 pada : a. Inspektorat Daerah b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan d. Dinas Koperasi & UKM e. Dinas Peternakan	700/704/366/VIII/2020 28 Agustus 2020 dan 700/704/377/IX/2020 07 September 2020	01 s/d 07 September 2020 dan 08 s/d 11 September 2020	 793.04/307/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/308/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/309/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/310/RKA/IX/ITDA 18 September 2020 793.04/311/RKA/IX/ITDA 18 September 2020

[illegible]

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	g. Kantor Camat Bontocani			700.04/150/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	h. Kantor Camat Tonra			700.04/151/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	i. Kantor Camat Kajuara			700.04/152/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
3	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Badan Perencanaan Daerah b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Dinas Pendidikan f. Kantor Camat Kahu g. Kantor Camat Cina h. Kantor Camat Mare	700/704/242/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	 700.04/153/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/154/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/155/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/156/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/157/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/158/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/159/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/160/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
4	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada : a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Dinas Sosial c. Dinas Perhubungan d. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga e. BLUD RS Tenriawaru f. Kantor Camat Tanete Riattang Barat g. Kantor Camat Ulaweng h. Kantor Camat Bengo i. Kantor Camat Tellu Limpoe	700/704/243/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	 700.04/161/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/162/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/163/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/164/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/165/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/166/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/167/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/168/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/169/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
5	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Dinas Perindustrian b. Dinas Ketahanan Pangan c. Dinas Kelautan dan Perikanan d. Dinas Kesehatan e. Dinas Lingkungan Hidup f. Kantor Camat Amali g. Kantor Camat Lamuru h. Kantor Camat Lappariaja	700/704/244/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	 700.04/170/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/171/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/172/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/173/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/174/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/175/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/176/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020 700.04/177/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
6	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air c. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian d. Sekretariat DPRD e. Kantor Camat Libureng f. Kantor Camat Salomekko g. Kantor Camat Barebbo h. Kantor Camat Ponre	700/704/245/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	
				700.04/178/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/179/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/180/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/181/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/182/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/183/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/184/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/185/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
7	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Dinas Tenaga Kerja b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Dinas Kebudayaan d. Badan Pendapatan Daerah e. Satuan Polisi Pamong Praja f. Kantor Camat Tanete Riattang Timur g. Kantor Camat Sibuluc h. Kantor Camat Patimpeng	700/704/246/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	
				700.04/186/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/187/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/188/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/189/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/190/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/191/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/192/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/193/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
8	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Dinas Pariwisata e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Kantor Camat Cenrana g. Kantor Camat Tellu Siattinge h. Kantor Camat Palakka	700/704/247/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	
				700.04/194/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/195/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/196/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/197/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/198/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/199/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/200/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
				700.04/201/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
9	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) th. 2019 pada : a. Inspektorat daerah	700/704/248/V/2020 27 Mei 2020	04 s/d 17 Juni 2020	
				700.04/206/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	b. Badan Penanggulangan Bencana			700.04/202/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	c. Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			700.04/203/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			700.04/204/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	e. Dinas Peternakan			700.04/205/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	f. Kantor Camat Ajangale			700.04/207/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
	g. Kantor Camat Dua Boccoe			700.04/208/SAKIP/VI/ITDA 22 Juni 2020
10	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Dinas Pendidikan b. Dinas Pemadam Kebakaran c. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik d. Dinas Pengendalian Pendudu & KB e. Dinas Perdagangan	700/704/485/XI/2020 20 November 2020	23 s.d. 27 November 2020	 793.04/399/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/400/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/401/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/402/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/403/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020
11	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Sekretariat Daerah b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Bappeda d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Dinas Perpustakaan & Kearsipan	700/704/487/XI/2020 26 November 2020	27 November s.d. 03 Desember 2020	 793.04/404/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/405/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/406/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/407/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/408/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020
12	Melakukan Evaluasi Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada BKPSDM Kab. Bone	700/704/488/XI/2020 26 November 2020	27 November s.d. 03 Desember 2020	793.04/409/BK/XII/ITDA 07 Desember 2020
13	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. BPKAD b. Dinas Kesehatan c. Dinas Lingkungan Hidup d. Dinas Sosial e. Dinas Kelautan & Perikanan	700/704/489/XI/2020 26 November 2020	27 November s.d. 03 Desember 2020	 793.04/410/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/411/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/412/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/413/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020 793.04/414/SPIP/XII/ITDA 07 Desember 2020
14	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Dinas Tenaga Kerja b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian d. Badan Pendapatan Daerah e. Satpol PP	700/704/491/XI/2020 26 November 2020	30 November s.d. 04 Desember 2020	 793.04/415/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020 793.04/416/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020 793.04/417/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020 793.04/418/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020 793.04/419/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
15	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Sekretariat DPRD b. Dinas Kebudayaan c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan d. Dinas PSDA	700/704/492/XI/2020 26 November 2020	30 November s.d. 04 Desember 2020	
				793.04/420/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020
				793.04/421/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020
				793.04/422/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020
				793.04/423/SPIP/XII/ITDA 10 Desember 2020
16	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. BKPSDM b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	700/704/506/XII/2020 08 Desember 2020	14 s.d. 18 Desember 2020	
				793.04/427/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/428/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/429/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/430/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
17	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Badan Penanggulangan Bencana b. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan c. DPMD d. Dinas Pariwisata e. Dinas Peternakan	700/704/507/XII/2020 08 Desember 2020	14 s.d. 08Desember 2020	
				793.04/431/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/432/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/433/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/434/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/435/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
18	Melakukan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada : a. Dinas Perhubungan b. Dispora c. Dinas Ketahanan Pangan d. Dinas Perindustrian e. RSUD Tenriawaru	700/704/509/XII/2020 08 Desember 2020	14 s.d. 08 Desember 2020	
				793.04/436/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/437/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/438/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/439/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
				793.04/440/SPIP/XII/ITDA 28 Desember 2020
MONITORING				
1	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa T.A.2019 di Kecamatan Kajuara Kab. Bone	700/704/03/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/03/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa T.A.2019 di Kecamatan Tonra Kab. Bone	700/704/03/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/04/I/ITDA 24 Januari 2020
2	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa T.A.2019 di Kecamatan Bontocani Kab. Bone	700/704/04/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/05/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa T.A.2019 di Kecamatan Cina Kab. Bone	700/704/04/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/06/I/ITDA 24 Januari 2020
3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa T.A.2019 di Kecamatan Kahu Kab. Bone	700/704/05/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/07/I/ITDA 28 Januari 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Mare Kab. Bone	700/704/05/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/08/I/ITDA 28 Januari 2020
4	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Lappariaja Kab. Bone	700/704/06/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/09/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Bengo Kab. Bone	700/704/06/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/10/I/ITDA 24 Januari 2020
5	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Lamuru Kab. Bone	700/704/07/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/11/I/ITDA 27 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Tellu LimpoE Kab. Bone	700/704/07/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/12/I/ITDA 27 Januari 2020
6	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone	700/704/08/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/13/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Amali Kab. Bone	700/704/08/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/14/I/ITDA 24 Januari 2020
7	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Salomekko Kab. Bone	700/704/09/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/15/I/ITDA 29 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Ponre Kab. Bone	700/704/09/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/16/I/ITDA 29 Januari 2020
8	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Patimpeng Kab. Bone	700/704/10/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/17/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Sibulue Kab. Bone	700/704/10/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/18/I/ITDA 24 Januari 2020
9	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Libureng Kab. Bone	700/704/11/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/19/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Barebbo Kab. Bone	700/704/11/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/20/I/ITDA 24 Januari 2020
10	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Ajangale Kab. Bone	700/704/12/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/21/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Dua BoccoE Kab. Bone	700/704/12/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/22/I/ITDA 24 Januari 2020
11	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Awangpone Kab. Bone	700/704/13/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/23/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Tellu SiattingE Kab. Bone	700/704/13/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/24/I/ITDA 24 Januari 2020
12	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Palakka Kab. Bone	700/704/14/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/25/I/ITDA 24 Januari 2020
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa T.A.2019 di Kecamatan Cenrana Kab. Bone	700/704/14/I/2020 06 Januari 2020	08 s.d. 21 Januari 2020	700.04/26/I/ITDA 24 Januari 2020
13	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kab. Bone di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bone	700/704/34/I/2020 21 Januari 2020	23 s.d. 29 Januari 2020	700.04/27/I/ITDA

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
14	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan MCP-Korsupgah dan Stranas Pencegahan Korupsi-KPK pada Inspektorat Daerah kab. Bone, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone, Badan Perencanaan Daerah Kab. Bone, Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bone, Unit Kerja Pelayanan Barang Jasa Kab. Bone.	700/704/193/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	700.04/130/MCP/IV/ITDA April 2020
15	Melakukan Monitoring dan Evaluasi beserta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/195/IV/2020 13 April 2020	14 s.d. 20 April 2020	700.04/131/PMPBR/IV/ITDA 22 April 2020
16	Melakukan Monitoring dan Evaluasi beserta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.	700/704/267/VI/2020 19 Juni 2020	22 s.d. 26 Juni 2020	700.04/211/PMPBR/VII/ITDA 26 Juli 2020
17	Melakukan Monitoring Penggunaan Dana Covid 19 di BPKAD, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, BLUD Tenriawaru, RSU Pancaitana Kab. Bone.	700/704/286/VII/2020 03 Juli 2020	06 s.d. 17 Juli 2020	793.04/215/AK/VII/ITDA 20 Juli 2020
18	Melakukan Monitoring Dana Desa terhadap Bantuan Lansung Tunai (BLT) terkait Covid-19 di Kec. Cina Kab. Bone.	700/704/314/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 05 Agustus 2020	700.04/219/VIII/ITDA 10 Agustus 2020
19	Melakukan Monitoring Dana Desa terhadap Bantuan Lansung Tunai (BLT) terkait Covid-19 di Kec. Ulaweng Kab. Bone.	700/704/315/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 05 Agustus 2020	700.04/220/VIII/ITDA 10 Agustus 2020
20	Melakukan Monitoring Dana Desa terhadap Bantuan Lansung Tunai (BLT) terkait Covid-19 di Kec. Barebbo Kab. Bone.	700/704/316/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 05 Agustus 2020	700.04/221/VIII/ITDA 10 Agustus 2020
21	Melakukan Monitoring Dana Desa terhadap Bantuan Lansung Tunai (BLT) terkait Covid-19 di Kec. Palakka Kab. Bone.	700/704/317/VII/2020 27 Juli 2020	29 Juli s.d. 05 Agustus 2020	700.04/222/VIII/ITDA 10 Agustus 2020
22	Melakukan Monitoring penyerapan & pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 pada kelurahan di Kec. Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat & Tanete Riattang Timur Kab. Bone.	700/704/468/XI/2020 10 Nopember 2020	11 s.d. 17 Nopember 2020	700.04/387/XI/ITDA 20 Nopember 2020
23	Melakukan Monitoring penyerapan anggaran tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kab. Bone & Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone	700/704/469/XI/2020 10 Nopember 2020	11 s.d. 17 Nopember 2020	700.04/388/XI/ITDA 20 Nopember 2020
24	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Bappeda b. DPMPTSP c. Dinas Pemadam Kebakaran d. Kec. Mare e. Kec. Bontocani f. Kec. Kajuara	700/704/519/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
25	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Sekretariat Daerah b. Badan Kesbangpol c. Dinas Perdagangan	700/704/520/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
	d. Dinas Perpustakaan & Kearsipan e. Kec. Tanete Riattang f. Kec. Tonra			
26	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Pendidikan b. Dinas Pengendalian Penduduk & KB c. Badan Penelitian & Pengembangan Daerah d. Kec. Cina e. Kec. Kahu	700/704/521/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
27	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. BPKAD b. Dinas Perhubungan c. Dinas Kelautan & Perikanan d. Kec. Lappariaja e. Kec. Tellu LimpoE	700/704/522/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
28	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas Perindustrian c. RSUD Tenriawaru d. Kec. Bengo e. Kec. Lamuru	700/704/523/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
29	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Dispora d. Kec. Tanete Riattang barat e. Kec. Ulaweng	700/704/524/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
30	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan b. Dinas Pengelolaan SDA c. Sekretariat DPRD d. Kec. Libureng e. Kec. Patimpeng	700/704/525/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
31	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Tenaga Kerja b. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil c. Dinas Kominfo d. Kec. Tanete Riattang Timur e. Kec. Ponre	700/704/526/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
32	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Bapenda b. Dinas Kebudayaan c. Satpol PP d. Kec. Sibulue e. Kec. Barebbo f. Kec. Salomekko	700/704/527/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
33	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Badan Penanggulangan Bencana b. DPPPA c. Dinas Koperasi UKM d. Kec. Tellu SiattingE e. Kec. Dua Boccoe	700/704/528/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
34	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. BKPSDM b. Dinas PU & Penataan Ruang c. Dinas Pariwisata d. Kec. Awangpone e. Kec. Cenrana	700/704/529/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
35	Melakukan Opname Kas & Opname Persediaan T.A. 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone : a. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan b. DPMD c. Dinas Peternakan d. Kec. Palakka e. Kec. Ajangale	700/704/530/XII/2020 21 Desember 2020	22 s/d 30 Desember 2020	
ASISTENSI dan PENDAMPINGAN				
1	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/187/IV/2020 07 April 2020	08 s.d. 15 April 2020	793.04/124/AST/IV/ITDA 15 April 2020
	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/240/V/2020 27 Mei 2020	28 Mei s.d 3 Juni 2020	793.04/143/AST/VI/ITDA 5 Juni 2020
2	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kab. Bone	700/704/282/VI/2020 30 Juni 2020	01 s.d. 07 Juli 2020	793.04/210/AST/VII/ITDA 7 Juli 2020
3	Melakukan Pendampingan Penginputan Data pada Aplikasi Sistem Monitoring Analisa Jabatan (SIMONA) pada Bagian Organisasi SETDA Kab. Bone	700/704/353/VIII/2020 24 Agustus 2020	25 s.d. 31 Agustus 2020	793.04/256/SIMONA/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
4	Melakukan Pendampingan pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan makanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone	700/704/388/VIII/2020 14 September 2020	15 s.d. 21 September 2020	781.04/39/IX/ITDA 23 September 2020



DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2020
(Pemeriksaan Khusus Kasus Kepegawaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat)

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
Pemeriksaan Kasus Permohonan Izin Perceraian PNS				
1	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Sitti Fatimah, S.Pd.I Nip. 19660930 198703 2 008 (Guru TK Al Munawarah Mallusetasi Kec. Sibulue) terhadap suaminya Sdr. A. Muhtar	700/704/35/I/2020 21 Januari 2020	23 s.d. 29 Januari 2020	781.04/01/I/ITDA
2	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hasnaeni Nip. 19800108 200801 2 010 (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Andi Yasin, A.Ma	700/704/37/I/2020 21 Januari 2020	23 s.d. 29 Januari 2020	781.04/03/I/ITDA
3	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Marlinda, SE. Nip. 19781118 200502 2 003 (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Susanto Sulle, ST.	700/704/92/II/2020 11 Februari 2020	17 s.d. 21 Februari 2020	781.04/05/II/ITDA 24 Februari 2020
4	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. A.M. Idris Ismail, S.Sos. Nip. 19770821 200904 1 002 (Lurah Pappolo) terhadap istrinya Sdri. Surisma Abidin, S.Pd., M.Hum.	700/704/100/II/2020 11 Februari 2020	17 s.d. 21 Februari 2020	781.04/04/II/ITDA 24 Februari 2020
5	Melakukan Pemeriksaan khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hj. Rosmawati Nip. (Pegawai RSUD Tenriawaru Kab. Bone) terhadap Suaminya Sdr. H. Baharuddin	700/704/114/II/2020 21 Februari 2020	24 s.d. 28 Februari 2020	781.04/06/III/ITDA 03 Maret 2020
6	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. A. Rohim, S. Pd. Nip. 19680402 199307 1 002 (Guru SD Inpres 4/82 Waji) terhadap istrinya Sdri. Sitti Hadijah	700/704/185/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	781.04/10/IV/ITDA 15 April 2020
7	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. Muhlis T., SE. Nip. 19711231 200801 1 033 (Pegawai kantor Camat Bontocani) terhadap istrinya Sdri. Asriyani Dahlan	700/704/186/IV/2020 03 April 2020	06 s.d. 13 April 2020	781.04/11/IV/ITDA 15 April 2020
8	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. A. Fadhilawati, S.Pd. Nip. 19841018 200903 2 003 (Guru SMP 4 Watampone) terhadap suaminya Sdr. Isman Sahir, S.S.	700/704/271/VI/2020 19 Juni 2020	24 s.d. 30 Juni 2020	781.04/14/VII/ITDA 3 Juli 2020
9	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hasnawati, S.Pd., M.Si Nip. 19770110 201101 2 004 (Staf Dinas Pendidikan Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Darwis, A., S.Pd.	700/704/290/VII/2020 03 Juli 2020	06 s.d. 10 Juli 2020	781.04/24/VII/ITDA 13 Juli 2020
10	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hartati Nip. 19801123 200801 2 009 (Staf Satpol PP Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Ishajir Sahaka.	700/704/291/VII/2020 03 Juli 2020	06 s.d. 10 Juli 2020	781.04/25/VII/ITDA 13 Juli 2020
11	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hasnawati Nip. 19621231 198306 2 023 (Guru TK Atira Kec. Mare Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Basri.	700/704/298/VII/2020 10 Juli 2020	13 s.d. 17 Juli 2020	781.04/27/VII/ITDA 20 Juli 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
12	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hasnatang, S.Pd Nip. 19750807 200701 2 016 (Guru SD Inpres 3/77 Bajoe) terhadap suaminya Sdr. Rusman.	700/704/299/VII/2020 10 Juli 2020	13 s.d. 17 Juli 2020	781.04/28/VII/ITDA 20 Juli 2020
13	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. A. Murtiningsih SP., MP Nip. 19780729 201001 2 012 (Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. A. Muh. Amir.	700/704/305/VII/2020 17 Juli 2020	20 s.d. 24 Juli 2020	781.04/30/VII/ITDA Juli 2020
14	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Andi Nur Amnah, ST. Nip. 19710505 200112 2 002 (Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Andi Faisal.	700/704/306/VII/2020 17 Juli 2020	20 s.d. 24 Juli 2020	781.04/31/VII/ITDA Juli 2020
15	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Azmawati, SKM Nip. 19840505 201101 2 036 (Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Sukirman, S.Pd.	700/704/335/VIII/2020 07 Agustus 2020	10 s.d. 14 Agustus 2020	781.04/32/VII/ITDA 18 Agustsu 2020
16	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Azmawati, SKM Nip. 19840505 201101 2 036 (Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Sukirman, S.Pd.	700/704/335/VIII/2020 07 Agustus 2020	10 s.d. 14 Agustus 2020	781.04/32/VII/ITDA 18 Agustsu 2020
17	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. Muhammad Amrullah Idris, SE., M.Si. Nip. 19781009 200801 1 009 (Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone) terhadap istrinya Sdri. ST. Rachima.	700/704/342/VIII/2020 14 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/33/VII/ITDA 28 Agustsu 2020
18	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Hj. Asmiah, S.Pd Nip. 19660606 198907 2 003 (Guru SMPN 1 Barebbo Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Syamsuddin, SH.	700/704/436/X/2020 20 Oktober 2020	21 s.d. 27 Oktober 2020	781.04/43/XI/ITDA 4 Nopember 2020
19	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Surya Nur S., S.Sos Nip. 19860928 201001 2 027 (Pegawai BPKAD Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Andi Ashar	700/704/437/X/2020 20 Oktober 2020	21 s.d. 27 Oktober 2020	781.04/44/XI/ITDA 4 Nopember 2020
20	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdri. Herlina, A.Md.Kep. Nip. 19810506 201411 2 001 (Perawat RSUD Datu Pancaitana Kab. Bone) terhadap suaminya Sdr. Agusalm	700/704/438/X/2020 20 Oktober 2020	21 s.d. 27 Oktober 2020	781.04/45/XI/ITDA 4 Nopember 2020
21	Melakukan Pemeriksaan Khusus permohonan perceraian A.n. Sdr. Anwar H. Nip. 19690110 200906 1 004 (Staf Kantor Camat Salomekko Kab. Bone) terhadap istrinya Sdri. Rosmini, S.Pd	700/704/404/XI/2020 03 November 2020	05 s.d. 11 November 2020	781.04/48/XI/ITDA 12 Nopember 2020
Pemeriksaan Kasus Kepegawaian				
1	Melakukan Pemeriksaan Khusus atas Laporan Andi Nurshanty Rasyid, SE. terhadap Elvira Wahid, S.Kom Nip. 19870930 201001 2 024 Kepala Seksi Informasi pada Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah melakukan perselingkuhan dengan suaminya atas nama Kadafi, SH., MH. Nip. 19820318 201001 1 012 Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone	700/704/215/IV/2020 30 April 2020	04 s.d. 11 Mei 2020	781.04/12/V/ITDA 12 Mei 2020

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN	NO. DAN TANGGAL SURAT TUGAS	WAKTU PELAKSANAAN	NO. DAN TGL. LHP
Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat				
1	Melakukan Pemeriksaan atas pengaduan kesatuan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Latenritatta terhadap pengelolaan usaha air melalui perpipaan dari wadah sumber air lanca di Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone	700/704/348/VIII/2020 12 Agustus 2020	18 s.d. 26 Agustus 2020	781.04/38/VIII/ITDA 31 Agustus 2020
2	Melakukan Audit atas Pengaduan CV. Arya Perdana terhadap Pokja Pemilihan Dinas Pendidikan Kab. Bone	700/704/399/IX/2020 21 september 2020	24 s.d. 30 september 2020	781.04/40/X/ITDA 12 oktober 2020
3	Melakukan Audit Khusus terkait atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana insentif bantuan guru mengaji yang dikelola oleh BKPRMI Kab. Bone	700/704/439/X/2020 22 Oktober 2020	23 Oktober s.d. 03 November 2020	781.04/46/XI/ITDA Nopember 2020
4	Melakukan Pemeriksaan Khusus Laporan Penyalahgunaan Wewenang Plt. Lurah Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone an. Andi Suriadi Sadar, S.STP., M.AP. Di Kantor Lurah Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone	700/704/478/XI/2020 18 November 2020	23 s.d. 27 November 2020	781.04/51/XI/ITDA 30 Nopember 2020
5	Melakukan Pemeriksaan Khusus mengenai laporan dugaan perbuatan melawan hukum oleh Kepala Desa Tea Malala Kec. Ulaweng Kab. Bone	700/704/480/XI/2020 20 November 2020	23 s.d. 27 November 2020	781.04/52/XI/ITDA 30 Nopember 2020



LAMPIRAN 6

Data Diklat/Bimtek yang diikuti oleh
Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone pada
Tahun 2020



**DAFTAR DIKLAT/BIMTEK YANG DIKUTI OLEH PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2020**

No	PESERTA DIKLAT/BIMTEK	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
DIKLAT PEMBENTUKAN/PENJENJANGAN APIP termasuk UJIAN SERTIFIKASI				
1.	1. Harmina, S.Kom. Nip. 19770228 200901 2 004 Pengelola Peraturan Perundang-Undangan 2. Asmar, S.Sos Nip. 19760820 200801 1 013 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3. Andi Nelmy Ratu Dwiyani Putri Aswar, S.E. Nip. 19941114 201903 2 029 Staf Inspektorat 4. Adhe Prastya Ramadhan, S.E Nip. 19910329 201903 1 014 Staf Inspektorat 5. Sahriwana, S.IP. Nip. 19931012 201903 2 012 Staf Inspektorat	Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Pertama	BPKP Prov. Sul-Sel	9 Februari s/d 3 Maret 2020
2.	1. Andi Lanna, S.Sos Nip. 19620612 199703 1 004 Pengawas Pemerintah Madya	Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/ Inpassing Angkatan III Tahun 2020	Kemendagri	20 September s/d 3 Oktober 2020 Golden Tulip Essential Hotel Makassar
3.	1. Abdul Wahid, S.Sos., M.Si. Nip. 19681112 199103 1 007 Analisis Bidang Pengawasan	Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional PPUPD Online Angkatan V Tahun 2020	Kemendagri	5 s/d 7 Oktober 2020
DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP SUBSTANTIF				
1.	1. Muh. Kafrawi Samad, S.T Nip. 19780202 200604 1 007 Kasubag. Perencanaan	Coaching Clinic Penyusunan ASB	BPKAD Kab. Bone & BPKP Prov. Sul-Sel	20 s/d 21 Januari 2020
2.	1. Mahadir, SH., MH. Nip. 19840316 201101 1 013 Auditor Muda 2. Adhe Prastya Ramadhan, S.E Nip. 19910329 201903 1 014 Staf Inspektorat	Workshop Peningkatan Kualitas LKPD melalui Peran Pengelola Keuangan dan APIP	Kementerian Keuangan RI Kanwil Prov. Sulsel	10 s/d 11 Februari 2020 Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
3.	1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN Nip. 19701020 199603 1 004 Inspektur 2. Ahmar, S.Sos Nip. 19800408 201001 1 019 Auditor Kepegawaian Muda 3. A. Mattalatta, S.E., M.Si. Nip. 19820429 201101 1 014 Analisis Perencanaan	Sosialisasi Program Diklat dan Kerjasama Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor	Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Selatan	10 s/d 11 Februari 2020 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK R.I, Gowa
4.	1. Sultan S.Pd., M.Si Nip. 19670101 198602 1 006 Pengawas Pemerintahan Madya	Bimtek Penyusunan LkjiP dan Perjanjian Kinerja	SEKDA	20 s/d 27 Februari 2020 Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
5.	1. H. Ilham, SE., M.Si. Nip. 19700713 200502 1 002 Sekretaris 2. Mahadir, SH., MH. Nip. 19840316 201101 1 013 Auditor Muda	Diklat Peningkatan Keahlian dalam Analisa Laporan Keuangan OPD dan LKPD	BPKAD Kab BONE	27 Februari s/d 1 Maret 2020 Hotel Denpasar Makassar
6.	1. Arifai Usman, S.H. Nip. 19690828 199203 1 008 Auditor Muda 2. Muh. Amrullah Idris, SE. Nip. 19781009 200801 1 009 Auditor Muda	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Probiy Audit	Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Selatan	18 s/d 19 Maret 2020 Aula Kantor Inspektorat Daerah Prov. Sulsel

No	PESERTA DIKLAT/BIMTEK		NAMA DIKLAT/BIMTEK	PENYELENGGARA	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
7.	1.	H. Ilham, SE., M.Si. Nip. 19700713 200502 1 002 Plt. Inspektur	Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2021	Gubernur Sulawesi Selatan	25 s/d 26 Agustus 2020 Gedung Balai Kartini Kab. Bantaeng
	2.	Husnani, SE. Nip. 19720303 199903 2 006 Inspektur Pembantu Wilayah II			
	3.	Arifai Usman, S.H. Nip. 19690828 199203 1 008 Auditor Muda			
8.	1.	Muhammad Amrullah Idris, SE., M.Si. Nip. 19781009 200801 1 009 Auditor Muda	Diklat dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar	LTKPI	3 s/d 7 november 2020 Hotel Arthama Makassar
PELATIHAN KANTOR SENDIRI					
1.		Pejabat Fungsional dan Staf dalam Lingkup Inspektorat Daerah Kab. Bone (60 Orang)	Pelatihan Kantor Sendiri Evaluasi Maturitas SPIP	Kerja Sama Inspektorat Daerah Kab. Bone & BPKP Prov. Sul-Sel	16 s/d 17 November 2020 Aula Inspektorat Bone